

No. **122** Februari - Maret 2016

[www.bakti.or.id](http://www.bakti.or.id)

# BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



Anggaran Cerdas di Sulawesi Utara

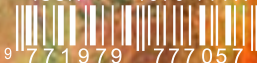
Transformasi Budaya:  
Gebrakan untuk Menjaga  
Eksistensi Sinrilik

Srikandi Pandu Tanah Air  
di Jambi

Sunat Perempuan Indonesia

TIDAK DIPERJUALBELIKAN  
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



# BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

[www.bakti.or.id](http://www.bakti.or.id)

**Editor** CAROLINE TUPAMAHU  
VICTORIA NGANTUNG  
IPUL DG. GASSING

**Suara Forum KTI** ZUSANNA GOSAL  
ITA MASITA IBNU

**Events at BaKTI** SHERLY HEUMASSE

**Website** ADITYA RAKHMAT

**Smart Practices  
& Info Book** SUMARNI ARIANTO

**Database  
Kontak** A. RINI INDAYANI

**Design & layout  
Editor Foto** FRANS GOSALI

## Redaksi

**Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146**

**Email [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id) atau [baktinews@bakti.or.id](mailto:baktinews@bakti.or.id) SMS BaKTI**News** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**

**Facebook [www.facebook.com/yayasanbakti](http://www.facebook.com/yayasanbakti) Twitter @InfoBaKTI**

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: [www.bakti.or.id](http://www.bakti.or.id) dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on [www.bakti.or.id](http://www.bakti.or.id) and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

## BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.

## MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

### Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [baktinews@bakti.or.id](mailto:baktinews@bakti.or.id).

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to [baktinews@bakti.or.id](mailto:baktinews@bakti.or.id).

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

# Daftar Isi

BaKTI News

Februari - Maret 2016

No. 122

- 1** Praktik Cerdas  
Anggaran Cerdas di Sulawesi Utara  
Penulis **EKO RUSDIANTO**  
Editor **SUMARNI ARIANTO**
- 5** MCA Indonesia  
Srikandi Pandu Tanah Air  
di Jambi  
Oleh **SYAIFULLAH**
- 9** Kesiapan Bima  
Sebagai Lokasi Replikasi Praktik  
Cerdas Pengelolaan Air Bersih  
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 13** Transformasi Budaya: Gebrakan untuk  
Menjaga Eksistensi Sinrilik  
Oleh **ISMAIL**
- 17** Reses Kesehatan Reproduksi  
Oleh **SITTI ZAHARA & M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 21** Pelayanan Kesehatan Produktif  
Harus Jangkau Anak Muda  
Oleh **HARYANI DANNISA**
- 25** Sunat Perempuan Indonesia  
Oleh **LIES MARCOES**
- 29** Update MAMPU-BaKTI  
Tidak Selalu Menunggu Uluran  
Tangan Negara  
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 33** Beasiswa Australia Awards
- 35** Lingkungan  
Menciptakan Mata Air Baru  
di Tengah Serbuan Mesin Galian  
Oleh **BAIQ TITIS YULIANTY**
- 39** Update Batukarinfo
- 40** Kegiatan di BaKTI
- 41** Info Buku

---

Ilustrasi Sampul : Frans Gosali



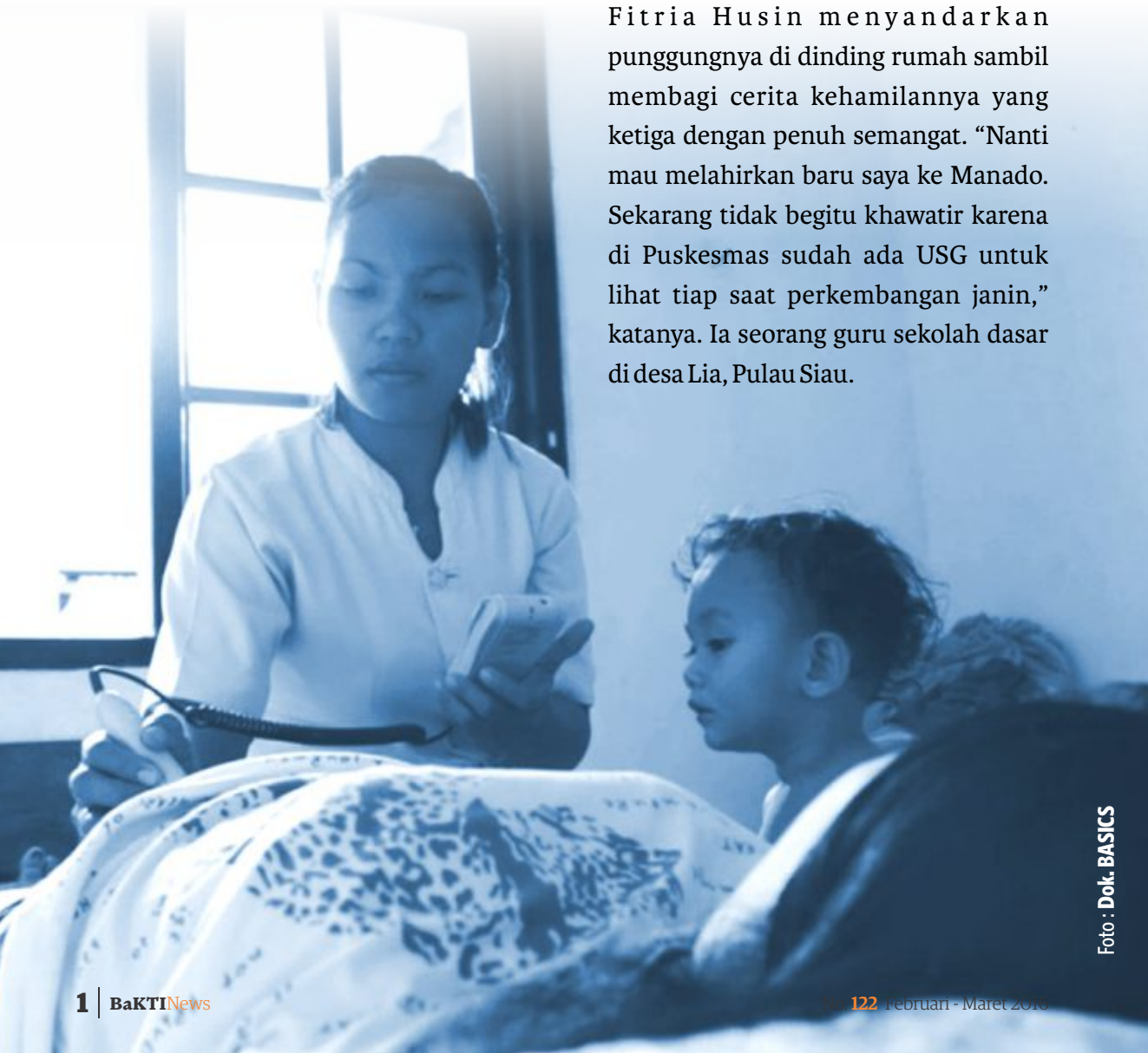
Uma Lengge, rumah tradisional Bima yang  
digunakan sebagai lumbung beras di Pulau  
Sumbawa Bagian Timur Provinsi NTB  
Foto: **Afdhaliya Ma'rifah**



# Anggaran Cerdas di Sulawesi Utara

Penulis **EKO RUSDIANTO**  
Editor **SUMARNI ARIANTO**

Fitria Husin menyandarkan punggungnya di dinding rumah sambil membagi cerita kehamilannya yang ketiga dengan penuh semangat. “Nanti mau melahirkan baru saya ke Manado. Sekarang tidak begitu khawatir karena di Puskesmas sudah ada USG untuk lihat tiap saat perkembangan janin,” katanya. Ia seorang guru sekolah dasar di desa Lia, Pulau Siau.





**P**ulau Siau, di Kabupaten Sitaro Sulawesi Utara adalah salah satu wilayah terjauh dari pusat ibu kota Provinsi. Jika musim sedang teduh, tak berombak, jarak tempuhnya dari Manado sekitar 4 jam menggunakan kapal feri. Jika musim ombak, jarak tempuhnya bisa dua kali lipat. Atau bahkan kapal tak beroperasi.

Populasi penduduk pulau Siau tergolong padat. Setidaknya sekitar 65 ribu orang mendiami pulau seluas 275,96 kilometer persegi ini. Dengan gunung api Karangetang yang menjulang tepat di tengah pulau, penduduk Siau tentu perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

Tidak hanya di pulau Siau Kabupaten Sitaro, pemerintah provinsi Sulawesi Utara bersama empat kabupaten lainnya, Bitung, Sangihe, Minahasa Utara dan Minahasa, sejak 2008-2010 telah membuat konsep perhitungan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak yang dilengkapi dengan perhitungan anggaran yang sangat detil.

Pada 2010-2011 pola ini mulai dijalankan, yang melahirkan konsep DAK Like (seperti DAK) untuk Bantuan Keuangan Khusus Kesehatan (BKKKes). Anggaran dari Provinsi langsung diserap ke Kabupaten dan Kota. Dan pada tahun 2014, Kementerian Kesehatan mengadopsi sistem ini.

### **Menghitung Pengeluaran**

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Sulawesi Utara periode 2010-2013, Noldy Tuerah cukup resah ketika membaca pengajuan anggaran dari masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Setiap tahun, permintaan anggaran hanya dinaikkan 10 persen.

“Saya tanya ke beberapa SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah), kenapa meminta alokasi dana, misalkan 100. Kenapa bukan 500 atau kenapa tidak 50,” kata Noldy

“Memang begitu pak. Setiap tahun kan naik 10 persen,” kata beberapa kepala SKPD.

Atas dasar inilah, menurut Noldy, beberapa program di SKPD tidak pernah selesai. Perencanaan yang tepat sesuai anggaran dan konsep yang jelas, tak pernah dilakukan. Akhirnya bersama lembaga mitra BASICS – lembaga non pemerintah yang konsen pada

pengembangan pelayanan dasar – memulai konsep penghitungan untuk pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak.

Untuk membuat konsep penghitungan secara detil, dalam tim ini bergabung ahli ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan beberapa akademisi lain dari berbagai kampus di Sulawesi Utara. Analogi mereka sederhana, selama ini melalui Bappenas konsep kebutuhan untuk pembiayaan, pada anak untuk pendidikan dasar sembilan tahun, dari sabang Pulau Weh sampai Merauke. Dari Miangas sampai pulau Rote, Standar Pelayanan Minimal (SPM), disamakan dengan yang ada di Jakarta.

Ironisnya, selama ini, pemerintah belum pernah menghitung anggaran secara detail dalam setiap wilayah. Akhirnya tim perumus, memilih pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak. Dalam perhitungan mereka, ditemukan sekitar 157 unit cost yang harus diakomodir.

Kenapa pertama kali diujicobakan pada Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak? Karena komponen biaya (*cost*) yang paling banyak adalah dalam pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak yaitu sebanyak 157 unit *cost*. Jika yang paling rumit saja bisa, apalagi untuk pendidikan paling hanya puluhan item.

Selama ini, anggaran dari Provinsi ke kabupaten A misalnya. Digunakan Kabupaten secara diskresi (kebebasan mengelola uang), silahkan mau digunakan untuk apa uang tersebut. Namun dengan perhitungan yang matang, tidak ada diskresi lagi.

Akhirnya melalui diskusi panjang, tim perumus kemudian menghitung besaran anggaran biaya ibu hamil dalam satu tahun hingga kunjungan puskesmas empat kali. Perhitungan juga memasukkan masa nifas ibu melahirkan selama 40 hari. Jadi perhitungan untuk setiap orang adalah sembilan bulan – atau sejak diketahui hari pertama kehamilan – ditambah 40 hari pasca melahirkan. Tahapan ini pun dibagi menjadi empat, pertama masa hamil, masa persalinan, kondisi komplikasi misalnya pendarahan dan atau operasi, dan masa nifas.

Tak hanya itu, tim ini juga menghitung seluruh komponen peralatan medis, baik yang digunakan berulang kali, ataupun penggunaan sekali pakai seperti jarum suntik. Setelah itu dibandingkan pula, dengan daerah yang

jangkauannya sulit. Misalnya di Talaud atau di Bolaang Mongondow, berbeda dengan harga satuan di Manado. Maka muncullah indeks aksesibilitas plus tambahan jarak. “Indeks inilah sebenarnya proxy antara jarak dan biaya,” kata Noldy. Jadi logikanya, semakin jauh jarak ibukota provinsi, maka anggaran akan semakin besar.

Perhitungan ini juga membuat data penghitungan semakin baik, sebab menembus hingga ke kecamatan. “Jadi selama ini, anggaran hanya dinaikkan 10 persen. Tidak sesuai kebutuhan. Seharusnya – mungkin saja – tidak tambah 10 persen atau mesti kurangi 5 persen. Kalau tidak digunakan, itulah yang menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Atau kalau tidak habis anggarannya, ya dibuatkan program supaya terserap,” kata Noldy.

### Apa beda DAK Like dan DAK Nasional

“DAK Nasional, penganggarannya seragam. Kan berbeda kebutuhan di Takalar (salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan) dan di Sitaro (salah satu Kabupaten di Sulawesi Utara). Tapi dalam kacamata Jakarta, itu semua sama,” kata Noldy.

Menurut dia, DAK Like yang saat ini dilaksanakan oleh provinsi Sulawesi Utara – melalui APBD – dan menjadi percontohan untuk seluruh kawasan Indonesia, memiliki tingkat penganggaran yang sangat rinci. Sistem ini, juga membentuk permintaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem penyaluran anggaran DAK Like ini, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) kemudian langsung ke kabupaten dan kota. Dinas Kesehatan Provinsi, hanya melakukan pengawasan dan mengapprove permintaan anggaran, namun tidak mengelolanya. Sistem inilah yang kemudian dinilai sebagai penghematan prosedural. Tidak berliku-liku. Dengan model penganggaran seperti ini, maka akses terhadap pelayanan kesehatan di setiap wilayah dapat dipastikan tidak terjadi penyeragaman suplai bantuan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang beragam.

Mekanisme yang dibuat jelas dan tegas ini, dilengkapi dengan penatausahaan, monitoring evaluasi, dan pelaporan model akuntansi untuk pertanggungjawabannya.



“ BKKKes membantu Pemerintah Kabupaten menentukan kebutuhannya yang paling mendesak, bukan berdasarkan keinginan.

---

*Ria M Papalapu*  
*Kepala Dinas Kesehatan*  
*Kabupaten Kepulauan Sitaro*

Dana BKKKes yang menjadi bagian dari APBD ini, juga membagi peran. Seperti Dinas Kesehatan Provinsi akan berperan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan. Dan bersama BPK-BMD provinsi bertanggung jawab menyusun petunjuk teknisnya.

Sistem dalam penganggaran ini jugalah yang kemudian melahirkan Peraturan Gubernur



Pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang dilakukan oleh seorang bidan di salah satu puskesmas di Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. **Foto: Dok. BASICS**

Sulawesi Utara Nomor 16 tahun 2013 tentang Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013-2015.

#### **Bantuan USG Portable dan Bidan Kit**

Tahun 2015, Kabupaten Sitaro mendapatkan anggaran melalui BKKKes sebanyak Rp1,1 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk USG portable di lima Puskesmas, bidan kit di 13 Puskesmas, dan sprayer untuk membunuh jentik nyamuk demam berdarah.

Kepala Puskesmas desa Ondong, Elsie Kuheba bercerita, “Waktu belum ada USG, diagnosa kita mungkin tidak seakurat sekarang. Anda bayangkan, jika seorang ibu harus dirujuk dan terlambat, dan untuk menuju Manado atau Bitung, bisa tiga jam, kalau siang. Kalau malam bagaimana,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sitaro, Ria M Papalapu, mengatakan BKKKes membantu kabupaten menentukan kebutuhannya yang paling mendesak, bukan berdasarkan keinginan.

Tak hanya bantuan alat kesehatan, tenaga medis pun mendapatkan penambahan pengetahuan melalui pelatihan untuk dokter dan bidan. “Jadi peralatan ada, maka pengetahuan untuk sumber daya manusia juga harus ditingkatkan,” kata Ria.

#### **Mengusahakan Perda**

Mengantisipasi masa berlaku Pergub 2013-2015, tim perumus bersama lembaga mitra BASICS, melakukan pertemuan dengan DPRD Sulawesi Utara. Pada November 2013, pokok-pokok pikiran mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disetujui DPRD dan dimasukkan dalam daftar prolegda.

Perda menjadi dasar hukum yang paling kuat untuk terus menggulirkan sistem ini. Noldy menganggap Pergub tidak begitu kuat, karena kepemimpinan bisa saja berganti dan setiap pemimpin memiliki cara kerja dan visi misi yang beda pula

Jadi, tim perumus BKKKes ini mendekati DPRD Sulawesi Utara dengan pengajuan Perda Kesehatan. Selama ini, aturan dan sistem BKKKes ini menjadi yang terbaik dan dianggap sebagai terobosan pemerintah provinsi yang paling membanggakan. “Saya kira hanya Sulawesi Utara yang melakukan sistem seperti ini,” kata Noldy.

Selama beberapa kali pertemuan dengan DPRD Sulawesi Utara, sambutan hangat selalu diterima. Konsep BKKKes menurut beberapa anggota DPRD sangat disukai. Harapannya, Perda Kesehatan yang didalamnya ada BKKKes disetujui dan bisa efektif di 2016,” kata Noldy.

#### **INFORMASI LEBIH LANJUT**

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Praktik Cerdas yang dipromosikan BaKTI hubungi kami melalui [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)



**L**ima orang perempuan jadi pembeda sore itu. Mereka menyeruak di antara belasan laki-laki yang berkumpul di sebuah bangunan tanpa dinding di tengah sawah. Perempuan-perempuan itu berpakaian sama dengan sebagian besar para lelaki yang hadir, kaus dominan warna putih dengan lengan panjang berwarna hijau.

Kelima perempuan itu adalah Rita Mayasari, Sulistiyawati, Purwaningsih, Isna Wati dan Nida Ma'rufah. Mereka adalah bagian dari Pandu Tanah Air desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bersama delapan pemuda desa Sukamaju lainnya, kelima perempuan muda itu terpilih menjadi bagian dari Pandu Tanah Air. Pandu Tanah Air sendiri adalah sebutan untuk kader-kader muda yang akan didampingi oleh Konsorsium Hijau.

"Awalnya namanya Kader Hijau, tapi mereka sendiri yang kemudian memilih nama Pandu Tanah Air waktu acara di Yogyakarta." Kata Refa'ul Khairiyakh, area manager Konsorsium

Hijau untuk Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

Mereka dipilih dari anak-anak muda desa yang merasa punya keinginan untuk membangun desanya. Khusus untuk Jambi total ada 43 orang Pandu Tanah Air dari dua kabupaten; Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi.

"Saya ingin mengembangkan potensi kaum perempuan di desa saya." Kata Isna Wati yang sore itu mengenakan jilbab berwarna hijau, senada dengan warna lengan kausnya.

Senada dengan Isna Wati, Rita Mayasari yang baru berumur 22 tahun juga mengaku ingin membaktikan dirinya untuk mengembangkan potensi kaum perempuan di desanya.

"Saya pikir semua orang punya keinginan untuk membangun desanya sendiri." Kata Rita, wanita yang menyelesaikan pendidikan biologi di kota Malang, Jawa Timur. "Dengan wawasan yang saya punyai, saya berharap bisa menggunakannya untuk membangun desa." Sambungnya.

Purwaningsih yang duduk di dekat Rita mengangguk, dia pun mengaku punya alasan yang sama. Meski awalnya mengaku sempat bingung tentang tujuan menjadi Pandu Tanah Air, namun seiring waktu berjalan, Purwaningsih mengaku semakin tahu apa saja yang akan dilakukannya bersama Pandu Tanah Air.

"Waktu di Jogja, saya kagum melihat pengolahan pupuk organik di desa yang kami kunjungi. Saya berpikir, kalau mereka bisa kenapa kami tidak? Desa kami juga punya potensi yang sama untuk mengolah pupuk organik." Katanya.

Kalau Purwaningsih dan Rita tertarik pada pengolahan sampah organik, maka Isna Wati mengaku tertarik untuk mengembangkan pemberdayaan perempuan di desanya dengan meningkatkan keterampilan mereka. Salah satunya dengan memanfaatkan sampah plastik menjadi kerajinan tangan yang berguna. Selain itu Isna Wati juga mengaku tertarik untuk mengembangkan kemampuan perempuan di desanya membuat penganan memanfaatkan hasil kebun. Sementara Sulistiyawati, Pandu Tanah Air berlatar pendidikan kebidanan mengaku tertarik untuk fokus pada bidang

# Srikandi Pandu Tanah Air dari Jambi

Oleh **SYAIFULLAH**



Para wanita yang tergabung dalam anggota Srikandi Pandu Tanah Air sedang mengadakan pertemuan dengan dampingan dari Konsorsium Hijau. **Foto : Dok. Yayasan BaKTI**

kesehatan seperti sanitasi kesehatan serta kesehatan ibu dan anak.

Di Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dua orang perempuan muda juga jadi terlihat berbeda di antara tujuh pemuda yang juga termasuk bagian dari 11 Pandu Tanah Air Desa Pandan Lagan. Kedua perempuan itu adalah Damisri dan Jumaidah. Total untuk Desa Pandan Lagan, ada tiga perempuan yang jadi Pandu Tanah Air. Ketika ditanya motivasi mereka untuk bergabung dan menjadi Pandu Tanah Air, mereka menjawab senada; ingin belajar banyak dan mengembangkan potensi desa mereka.

“Saya tertarik untuk ikut jadi Pandu Tanah Air karena mau mencari cara bagaimana bagaimana mengajak ibu-ibu ini untuk mengembangkan potensinya sekaligus mengajak perempuan-perempuan muda di desa ini untuk berpikir lebih maju.” Kata Damisri, perempuan 29 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai staff pemerintahan desa sekaligus mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pengembangan potensi yang dimaksud Damisri salah satunya adalah bagaimana mengubah sampah plastik menjadi sesuatu yang lebih berguna. Jumaidah, wanita 21 tahun berdarah Bugis Bone yang juga jadi Pandu Tanah Air Desa Pandan Lagan juga mengaku punya tujuan yang sama dengan Damisri. Berdua mereka merasa resah melihat sampah plastik dan sampah rumah tangga di desa mereka yang dibiarkan bertaburan begitu saja.

“Saya membayangkan sampah seperti plastik atau kertas itu kalau diolah jadi hiasan pasti akan lebih berguna.” Kata Jumaidah.

### Beragam Alasan Menjadi Pandu Tanah Air

Tertarik belajar sesuatu yang baru, ingin mengembangkan potensi desa dan ingin mengembangkan kemampuan berorganisasi adalah tiga dari beragam alasan yang dikemukakan oleh Pandu Tanah Air di empat desa di Provinsi Jambi. Mereka dengan mata berbinar menceritakan alasan-alasan mereka memutuskan bergabung menjadi Pandu Tanah Air, ditambah dengan rencana-rencana mereka setelah bergabung menjadi Pandu Tanah Air.

Di Provinsi Jambi, Pandu Tanah Air itu tersebar di empat desa dan dua kabupaten. Desa Kasang Lopak Alai dan Tangkit di Kabupaten Muaro Jambi serta Desa Pandan Lagan dan Sukamaju di Tanjung Jabung Timur. Dari keempat desa itu perekrutan dilakukan dengan beragam cara, tapi umumnya sama karena dilakukan oleh peneliti awal dari Konsorsium Hijau. Peneliti itu memetakan anak-anak muda berusia antara 19 sampai 35 tahun di keempat desa tersebut sebelum akhirnya memutuskan menawari mereka untuk menjadi anggota Pandu Tanah Air.

“Sebagai tahap seleksi awal, kami meminta calon anggota Pandu Tanah Air itu untuk membuat tulisan singkat. Isinya tentang apa yang akan mereka lakukan buat desa mereka seandainya mereka menjadi Pandu Tanah Air.” Kata Sopiyan, wakil dari Konsorsium Hijau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tulisan yang dibuat para calon Pandu Tanah Air itu jadi salah satu pertimbangan lolos tidaknya mereka sebagai anggota Pandu Tanah Air. Dari sebelas orang yang ditawarkan, satu di antaranya tidak bisa memenuhi syarat tersebut. “Ya kami tidak bisa memaksa, kalau memang tidak bisa ya apa boleh buat. Mereka tidak kami terima.” Kata Ikhlas, wakil lainnya dari Konsorsium Hijau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Setelah proses seleksi awal, para Pandu Tanah Air dari Provinsi Jambi itu kemudian diikutkan dalam kegiatan kunjungan belajar di Daerah Istimewa Yogyakarta selama lima hari sejak tanggal 15 Desember 2015. Di sana mereka dibagi dalam empat kelompok dan mengunjungi empat desa terpisah. Kunjungan ini ternyata sangat berkesan bagi para Pandu Tanah Air Provinsi Jambi. Rata-rata dari mereka mengaku kagum melihat desa-desa yang mereka datangi, kekaguman yang kemudian jadi motivasi untuk melakukan hal yang sama di desa mereka.

“Kalau menurut saya, desa-desa yang kami kunjungi di Yogyakarta itu sama saja dengan desa kami. Bedanya, mereka lebih pandai mengemas dan mempromosikan desa mereka sehingga terlihat berbeda.” Kata Beni Setiawan, ketua Pandu Tanah Air Desa Sukamaju.

“Mungkin yang paling berbeda adalah di pola pikir dan kesadaran mereka untuk memajukan desa.” Sambung M. Fadi, Pandu Tanah Air lainnya dari Desa Sukamaju.

## Ada yang Sudah Punya Program, Ada yang Masih Menunggu

Sepulang dari Daerah Istimewa Yogyakarta, para Pandu Tanah Air Provinsi Jambi kemudian mulai menyusun apa yang akan mereka lakukan. Hendra (32) mewakili teman-teman Pandu Tanah Air Desa Kasang Lopak Alai, menceritakan tentang tujuan jangka pendek mereka membuat koperasi desa.

“Pertama kami memang akan fokus di kewirausahaan hijau.” Kata Hendra. “Dari situ nanti akan berkembang karena juga akan melibatkan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) dan kelompok-kelompok tani.” Lanjutnya.

Sementara itu para anggota Pandu Tanah Air desa Pandan Lagan malah antusias untuk program jangka panjang membuat semacam majalah atau buku yang isinya adalah beragam pengetahuan hijau. “Saya membayangkan nanti pengetahuan-pengetahuan ini bisa jadi warisan untuk anak-cucu kita nanti. Dibaca hingga turun temurun.” Kata Prijal, ketua Pandu Tanah Air Desa Pandan Lagan.

Lain lagi dengan para Pandu Tanah Air dari Desa Sukamaju. Mereka dengan bersemangat –bahkan seperti berebutan– mengutarakan rencana dan impian mereka menjadikan Desa Sukamaju sebagai salah satu desa tujuan wisata, khususnya edu wisata. Rupanya kunjungan ke Daerah Istimewa Yogyakarta menumbuhkan ide untuk melakukan hal yang sama.

“Mereka bisa membuat desa mereka jadi desa wisata, seperti wisata menanam padi sampai memberi makan bebek. Kalau seperti itu, desa kami juga bisa.” Kata Beni Setiawan.

Semangat untuk mewujudkan program membuat para Pandu Tanah Air desa Sukamaju begitu rajin bertemu, minimal sekali sepekan. Berkumpul untuk mematangkan program atau sekadar bersilaturahmi, saling menguatkan agar tak patah semangat di tengah jalan.

“Ada warga yang sampai bilang ke kami; heh, kalian ini kumpul-kumpul buat apa? Jangan-jangan kalian ini ikut GAFATAR ya?” Kata Eko Yulianto, salah seorang anggota Pandu Tanah Air Desa Sukamaju sambil tertawa. GAFATAR adalah sebuah organisasi yang sempat menghebohkan Indonesia karena dianggap organisasi yang menyimpang.

Kalau Pandu Tanah Air di tiga desa itu sudah punya program, maka berbeda dengan desa Tangkit. Mereka mengaku belum bisa membuat





Kader muda Desa Sukamaju berfoto bersama selepas kegiatan. **Foto : Dok. Yayasan BaKTI**

program jangka panjang yang jelas karena masih menunggu pemilihan kepala desa yang akan digelar di akhir bulan Maret 2016. Pemerintah desa yang sekarang sudah sangat mendukung program mereka, tapi entah dengan pemerintah desa yang akan datang mengingat pejabat sementara kepala desa yang sekarang tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa.

“Kalau ganti orang, kita tidak tahu. Apakah mendukung atau tidak?” Kata Rangga Permana, Pandu Tanah Air dari Desa Tangkit. Meski begitu, Rangga dan teman-temannya mengaku masih tetap melakukan kegiatan jangka pendek, salah satunya adalah membuka lahan yang diisi dengan tanaman obat. Kegiatan ini sebagai pengisi waktu sebelum mereka membuat kegiatan jangka panjang, tergantung hasil pemilihan kepala desa bulan Maret nanti.

### Srikandi yang Bukan Sekadar Pelengkap

Dari beragam alasan bergabung dan rencana kegiatan, para perempuan anggota Pandu Tanah Air dari Provinsi Jambi nampaknya akan mengambil peranan penting di masa depan. Mereka adalah perempuan-perempuan muda yang punya visi jauh ke depan untuk mengembangkan potensi perempuan-perempuan di desa mereka. Visi yang mungkin

tidak akan mudah untuk diwujudkan karena butuh perjuangan panjang dan tekad kuat.

“Setidaknya kami harus memberi contoh dulu. Misalnya, gelas plastik bekas air mineral itu juga bisa diolah jadi kerajinan tangan.” Kata Isna Wati. “Kami yakin, kalau sudah melihat contoh warga desa bisa lebih mudah untuk berpartisipasi.” Sambungnya.

Perempuan-perempuan Pandu Tanah Air dari Provinsi Jambi itu seperti membawa harapan baru untuk masa depan desa yang lebih baik. Bukan sekadar hasil pertanian yang menawan, tapi hasil kreasi tangan perempuan desa yang memikat. Mereka bukan hanya pelengkap atau sekadar memenuhi kuota semata, tapi juga jadi penggerak dan pemangku harapan besar sebuah perubahan dari desa di Provinsi Jambi.

Jalan panjang buat Srikandi Pandu Tanah Air dari Jambi, jalan yang mudah-mudahan tak membuat mereka kehabisan tenaga dan semangat di sebelum tiba di ujung.

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pengetahuan Hijau yang adalah kerjasama MCA-Indonesia dengan Yayasan BaKTI, Anda dapat menghubungi kami melalui [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

# Kesiapan Bima Sebagai Lokasi Replikasi Praktik Cerdas Pengelolaan Air Bersih

Oleh **SUMARNI ARIANTO**



Bapak Moehamad Nawaludin DJS dari Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional - Bappenas memberikan sambutan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Kabupaten Bima. **Foto : Dok. Yayasan BaKTI**

**B**ima, salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Barat yang terletak di bagian timur pulau Sumbawa. Ibu Kota Bima yakni Woha dapat ditempuh dengan moda pesawat dari Mataram kurang lebih 1 jam dan dengan perjalanan darat-laut menyeberangi selat Alas dari pulau Lombok dengan waktu tempuh kurang lebih 12 jam.

Pada tanggal 25 Januari 2016 tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional, United Cities Local Government-Asia Pacific (UCLG-ASPAC), Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan Knowledge Sector Initiative (KSI) Australia yang tergabung dalam program

**Keberhasilan replikasi ditentukan antara lain oleh kesiapan daerah yang akan mereplikasi.**



pengembangan Knowledge Center (KC) berkesempatan mengunjungi Bima. Kegiatan hari itu adalah FGD dalam rangka menggali informasi tentang kesiapan Bima dalam replikasi Praktik Cerdas Pengelolaan Air dilaksanakan.

FGD dan Survey yang dilaksanakan tersebut adalah bagian dari kegiatan *Knowledge Center* (KC) dalam upaya mereplikasikan Praktik Cerdas yang telah terpilih. KC sendiri merupakan *repository* (tempat penyimpanan) terpusat untuk informasi, pengetahuan, dan praktik-praktik cerdas di bawah Bappenas. KC diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan nasional dan daerah berbasis bukti dan pengetahuan dalam rangka meluaskan pembangunan melalui *knowledge sharing* dan *lesson learned* yang memberikan solusi serta mudah diadopsi oleh daerah lain. Fungsi KC adalah sebagai penyedia pengetahuan dan solusi serta pusat pembelajaran (*learning*) melalui kumpulan pembelajaran (*stock of lessons learned*), publikasi, dan praktik - praktik cerdas di Indonesia.

Salah satu Praktik Cerdas yang dipilih sebagai pilot project untuk replikasi melalui program kerjasama Bappenas, KSI, beserta BaKTI dan UCLG-ASPAC adalah “Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Lendang Nangka - Kabupaten Lombok Timur” dengan



rencana daerah replikasi yaitu Desa Sari, Kecamatan Sape - Kabupaten Bima.

Keberhasilan replikasi ditentukan antara lain oleh kesiapan daerah yang akan mereplikasi. Untuk memastikan kesiapan daerah yang akan melakukan replikasi, maka akan ditinjau melalui beberapa aspek yaitu kesesuaian (*compatibility*), tingkat keterlibatan (*engagement*) dan kesiapan (*readiness*).

FGD dan Survey tersebut juga dilaksanakan untuk memverifikasi dan memvalidasi data awal yang telah diberikan oleh Bappeda dan Pemerintah Desa pada pertemuan workshop sebelumnya di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016.

Mengambil tempat kegiatan di Ruang Pertemuan Hotel Mutmainnah, sebanyak 43 peserta hadir dan terlibat aktif dalam FGD yang dipandu oleh Ibu Luna Vidya dari BaKTI. Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan pemangku kepentingan seperti Bappeda, Pokja AMPL (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), PDAM, perwakilan dari Desa Sari, perwakilan dari Desa Riamau, Camat Sape, Camat Wawo, perwakilan dari Dit. Kerjasama Pembangunan Internasional, Bappenas, Perwakilan dari Knowledge Sector Initiative, Perwakilan dari UCLG-Aspac dan Perwakilan dari BaKTI.

Pertemuan diawali dengan sambutan oleh Kepala Bappeda Bima yakni Bapak Ir. Indra Jaya. Dalam

sambutan beliau menjelaskan bahwa Kegiatan FGD dan survey yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari workshop yang diikuti Bappeda Kab. Bima tanggal 14 Januari 2016 di Jakarta. Beliau juga menyampaikan kepada peserta bahwa keberhasilan praktik cerdas pengelolaan air di Desa Lendang Nangka, Lombok Timur akan direplikasi di Kab. Bima. Bappeda sudah mengidentifikasi Desa Sari, Kecamatan Sape yang memiliki karakteristik kurang lebih sama dengan Desa Lendang Nangka tetapi masih memiliki kekurangan dalam hal pengelolaan air. Beliau berharap kelembagaan pengelolaan air Desa Sari bisa seperti di desa Lendang Nangka yang memiliki unit PAMDes di bawah pengelolaan BUMDES dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Secara resmi, kegiatan FGD dibuka oleh Bupati Bima yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Drs. H. Muzakkir, M.Sc. Beliau menyambut baik dan mengapresiasi rencana pelaksanaan *pilot project* replikasi praktik cerdas di Kabupaten Bima. Pemerintah Kabupaten Bima juga berkomitmen untuk terus mendorong pengelolaan air bersih karena merupakan sektor prioritas Kabupaten Bima. Beliau atas nama pemerintah kabupaten Bima berterima kasih kepada Bappenas karena tahun 2016 Dana Alokasi Khusus (DAK) pengembangan air bersih di Dinas PU naik signifikan menjadi Rp 36 Milyar, biasa hanya sekitar Rp 3-4 Milyar. Dari APBN masuk Rp 1.7 Milyar, jadi total dana yang diterima sekitar Rp 38 Milyar.

Sambutan dari Bappenas melalui Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional disampaikan oleh Bapak Moehamad Nawaludin DJS. Beliau menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan tim KC ke Bima. Menurutnya, perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan secara komprehensif tetapi masih banyak perencanaan yang tidak diimplementasikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, KPI Bappenas menginisiasi pembentukan *Knowledge Centre* yang melaluinya diharapkan dapat dilaksanakan kegiatan yang berdampak nyata bagi masyarakat meskipun dalam lingkup yang kecil.

Setelah sesi pembukaan dan sambutan, FGD dilanjutkan dengan diskusi terarah. Seluruh peserta yang hadir tampak antusias mengeluarkan pendapat dan masukannya.





Kabid. Sosbud BAPPEDA Kabupaten Bima, Bapak Amar Maruf, sedang memberikan tanggapan dalam kegiatan diskusi. **Foto : Dok. Yayasan BaKTI**

Beberapa informasi menarik yang tergalil sepanjang proses FGD adalah tantangan yang dihadapi Kabupaten Bima dan Desa Sari dalam pengelolaan air serta potensi yang dimiliki seperti kemampuan manajemen pengelola yang masih rendah dan dijalankan secara tradisional namun telah memiliki Bumdes, kemampuan teknis/operasional pemeliharaan sarana air minum yang masih harus ditingkatkan. Selain itu, tantangan dalam hal Kebijakan/Regulasi juga terungkap seperti perlunya dilakukan review Peraturan Desa mengenai BUMDES, perlu ditingkatkan status *memorandum of understanding* (MoU) atau kesepakatan antara Desa Sari dan Desa Riamau dengan inisiator dari Desa Sari serta perlunya penyusunan peraturan bersama antar desa terkait pemanfaatan air.

Selain itu informasi mengenai kondisi fisik sarana air minum juga dijelaskan peserta seperti perlunya kajian teknik dari Dinas PU karena kondisi fisik sarana air minum dibangun sejak tahun 2010, pembangunan penampungan air (reservoir) untuk perluasan jangkauan pelayanan, penambahan jaringan pipa dan asesoris seta perlunya penambahan sambungan rumah.

Salah satu hal menarik dalam proses FGD ini adalah teridentifikasinya komitmen-komitmen beberapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang hadir seperti BPMDes, Bappeda dan Pokja AMPL untuk nantinya terlibat aktif dalam rencana *pilot project* replikasi praktik cerdas ini sesuai dengan kapasitas dan mandat dari dinas-dinas masing-masing. Komitmen-komitmen tersebut kemudian tertuang dalam rencana tindak lanjut yang berhasil dirumuskan pada akhir kegiatan FGD.

FGD yang berlangsung hari itu selama hampir 6 jam kemudian ditutup oleh ibu Luna Vidya dengan menghasilkan poin-poin informasi penting serta komitmen-komitmen pemerintah Kabupaten Bima melalui pemangku kepentingan yang hadir dan berkontribusi aktif hingga kegiatan berakhir.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pilot Project Replikasi Praktik Cerdas, Anda dapat menghubungi kami melalui [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

*Kukutaknangmi kalengku, kukutaknangmi iya kalengku / kukasukmang iya ri nyawaku, kukasukmang iya ri nyawaku / battu riapa iya assala' kajariangku / ngasseangna karaengnu, pijagai mi kalengnu / kere mi mae pa'rimpungang nyawanu / battu ri ria ji antu, ka battu ri ria ji antu kajarianna iya nyawanu, siagang iya ria tojeng ji rama'liang tallasa'nu. (sinrilik pappasangna Anrong Gurutta)*

Aku bertanya pada diriku, bertanya pada diriku sendiri / kutanyakan pada jiwaku sendiri, kupertanyakan pada jiwaku / dari mana asal kehadiranku / semua sepengetahuan Tuhanmu, jagalah dirimu sendiri / di mana nanti jiwamu akan kembali / semua dari Dia, jiwamu bisa ada hanya karena Dia, dan hanya Dia yang menjaga kehidupanmu. (sinrilik pesan Maha Guru)

# Transformasi Budaya: Gebrakan untuk Menjaga Eksistensi Sinrilik

Oleh **ISMAIL**



Ilustrasi **FG**



**R**uang di panggung itu terlihat begitu gelap, tak ada cahaya gemerlap seperti konser musik kekinian. Sorot lampu yang tidak begitu terang menampakkansosok muda dengan wajah tegas dan tirus di sudut kanan panggung. Ia mengenakan pakaian serba hitam dengan passappu(tutup kepala khas Bugis-Makassar) di atas kepalanya. Tangan kirinya bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti ritme ucapannya. Dengan begitu piawai, tangan kirinya menggesek-gesekkan dawai kesok-kesok yang terdengar mendayu-dayu dalam heningnya malam. Ucapannya begitu merdu dengan permainan intonasi dan tekanan nada yang begitu harmonis.

Kata-kata dalam bahasa Makassar yang terdengar bak sebuah cerita terus mengalir mengisi ruang dengar penonton. Sese kali nada suaranya meninggi, lalu berubah lirih di tiap-tiap baris ucapannya. Meski saya hanya paham sedikit tentang bahasa Makassar, namun malam itu saya begitu menikmati alunan nada kesok-kesok yang sangat unik dan sarat budaya nilai kearifan lokal tersebut.

Kesok-kesok adalah nama instrumen gesek berdawai satu dari Sulawesi Selatan yang dimainkan secara vertikal sambil duduk oleh satu orang sambil bernyanyi atau bertutur. Alat musik ini biasa digunakan dalam salah satu tradisi seni khas Sulawesi yang disebut sinrilik. Pemainnya biasa disebut sebagai pasinrilik.

Penampilan pasinrilik muda di panggung pentas komunitas malam itu, memberikan tontonan budaya asli Makassar yaitu sinrilik. Tontonan yang sudah sangat jarang ditampilkan dalam keseharian masyarakat. Bahkan saat ini kesenian dan budaya tutur sinrilik sudah terancam punah karena regenerasi yang tidak berjalan baik.

Di masa awal kelahirannya sekitar abad ke-15, sinrilik biasa digunakan sebagai penyampai pesan raja dari istana. Di masa-masa berikutnya sinrilik mulai menyajikan kisah epik seputar hikayat dan legenda yang dinyanyikan semalam suntuk. Cerita sinrilik tersusun secara puitis, yang didalamnya disisipkan humor dan kritik sosial.

Sinrilik sendiri merupakan salah satu karya sastra lisan yang dimiliki oleh masyarakat Makassar. Dalam situs resmi kementerian Kebudayaan Indonesia, sinrilik dijelaskan sebagai warisan budaya tutur dalam masyarakat Makassar yang biasa ditampilkan sebagai media hiburan dan pelajaran nilai-nilai budaya. Meskipun kini pementasan sinrilik selalu menggunakan musik pengiring dan kesok-kesok, ternyata sinrilik juga dapat dipentaskan hanya dengan suara pasinrilik saja.

Mengutip informasi dari tulisan Sinrilik Karya Sastra Unik dari Kota Daeng Makassar, sinrilik yang dilagukan dengan alat musik kesok-kesok yang berbentuk rebab dinamakan Sinrilik Kesok-Kesok, yaitu sinrilik yang berisi kisah perjuangan dan kepahlawanan seorang tokoh. Sedangkan yang hanya dilagukan tanpa ada iringan musik dikenal dengan sebutan Sinrilik Bosi Timurung yang berisi tentang banyak hal, seperti pujian untuk kekasih hati, rasa iba dengan musibah yang ada, ataupun kesedihan orang yang ditinggalkan keluarganya. Sehingga secara tidak langsung pertunjukan sinrilik mengajarkan banyak hal kepada para pendengarnya. Itulah mengapa dahulu, sinrilik mendapat tempat di hati masyarakat Makassar.



“ Sinrilik itu menggunakan tipikal musik yang monoton. Sejenis musik yang digunakan untuk mengiringi orang bertutur atau berdongeng.

---

Seiring dengan perkembangan zaman, media hiburan tradisional seperti sinrilik secara cepat tergantikan dengan pementasan musik yang lebih menarik dengan nada-nada yang lebih dinamis. Tak heran mengapa saat ini penikmat atau pasrinrilik itu sendiri semakin sedikit dan bahkan jumlahnya bisa dihitung jari. Pun ketika saya bertanya kepada seorang teman, Nur Rahmat Hidayat, seorang pegiat literasi Kota Makassar. Secara pribadi, ia begitu menyayangkan minimnya minat yang dimiliki masyarakat terhadap keberlangsungan warisan budaya tersebut.

“Saya rasa kebudayaan sinrilik ini perlu untuk kita pertahankan, yah kalau perlu kita galakkan kembali pementasan sinrilik. Mungkin masyarakat perlu tahu lebih dalam tentang budaya lisan asli Makassar ini”, katanya sembari menikmati segelas sarabba telur yang sedari tadi menemani perbincangan kami.

Yayas, begitu saya akrab menyapanya, seakan mulai serius dengan gagasannya mengenalkan kembali budaya asli Makassar tersebut, bahkan malam itu ia berencana menuliskan sebuah buku tentang pasinrilik yang memang masih sangat jarang.

“Kalau tidak salah, sekarang baru ada dua buku yang saya baca yang menulis tentang sinrilik itu, satu yang berupa kumpulan naskah sinrilik dan satunya lagi memuat sinrilik sebagai salah satu bagian dari penjelasan kebudayaan Makassar” jelasnya dengan penuh semangat. Matanya yang terlihat membulat seakan meyakinkan dirinya bahwa rencananya akan sangat berarti bagi keberlangsungan budaya sinrilik di masa depan.

Mungkin apa yang dikatakan Yayat merupakan bentuk apresiasi sastra yang paling tepat untuk memberikan informasi tentang kebudayaan lisan sinrilik. Tapi untuk mempertahankan keberlangsungan pertunjukan sinrilik, saya rasa perlu usaha yang lebih dari sekadar tulisan. Regenerasi pasinrilik dan juga tersedianya ruang pertunjukan yang memadai menjadi kunci utama untuk terus menjaga keberadaan sinrilik di tengah-tengah gempuran budaya asing saat ini. Namun apakah regenerasi dan ruang pertunjukan sinrilik masih bisa kita temui sekarang ini?

Arif Rahman Dg. Rate, lelaki asli Kajang yang telah berumur seperempat abad, merupakan satu di antara tiga orang yang masih tetap setia menjaga kelestarian budaya sinrilik. Di tengah kesibukannya sebagai pengajar bahasa, ia masih gencar membawa kesok-kesoknya dari panggung ke panggung. Ia pun kini aktif mengampanyekan sebuah gerakan literasi berbasis sinrilik yang ia yakini sebagai bentuk pertahanan eksistensi budaya sinrilik.

Keseriusan Arif Rahma Dg. Rate terlihat jelas dari betapa semangatnya ia menjawab pertanyaan yang saya ajukan ketika menggali tentang sinrilik. Ia menceritakan bagaimana ia mulai berkenalan dengan sinrilik pada tahun 2009 silam. Kala itu ia masih di tahun pertama sebagai mahasiswa jurusan Bahasa Inggris. Melalui artikel-artikel yang ia baca, akhirnya ia memutuskan untuk merambah dunia sinrilik secara serius di akhir 2010. Dan di awal 2011 ia telah betul-betul terjun dalam pertunjukan sinrilik dengan tampil di panggung-panggung pementasan berskala kecil untuk pemula.

Ia pun menuturkan bagaimana keseriusannya belajar dari seniman sinrilik di Gowa yaitu Bapak Syarifuddin Dg. Tutu. Pun begitu ia menimba ilmu tentang teknik bermain musik kesok-kesok dari Bapak Haeruddin yang merupakan perajin kesok-kesok yang sudah terkenal di tanah Gowa.

Ketika ditanya mengapa orang-orang sudah tidak terpicat dengan pertunjukan sinrilik, ia menjawabnya dengan begitu lugas dan jelas.

“Sinrilik itu menggunakan tipikal musik yang monoton. Sejenis musik yang digunakan untuk mengiringi orang bertutur atau berdongeng. Olehnya itu eksplorasi nadanya cuma sampai lima not saja. Itupun pola

bermainnya sangat monoton”. Jelasnya sambil memperagakan bagaimana gerakan tangannya seakan mengganti nada-nada kesok-kesoknya.

“Sinrilik itu dimainkan dengan bertutur, dengan menggunakan bahasa Makassar, passinrilik menceritakan kisah-kisah sejarah yang butuh pemahaman yang lebih seksama. Hal tersebut yang buat orang-orang malas mendengarkannya lagi. Padahal sinrilik itu bercerita tentang lokalitas dan kearifan masa lalu yang mengandung banyak nilai-nilai positif. Selain itu saat mendengarkan sinrilik ada nuansa yang membawa kita ke alam meditasi. Istilah para seniman, sinrilik itu musik jiwa”, ujarnya sembari mengibaskan tangannya mengusir nyamuk.

Malam itu kami berbincang cukup lama. Selain membahas masalah eksistensi sinrilik yang mulai mengkhawatirkan, ia menjelaskan bagaimana semestinya sinrilik itu harus bertransformasi agar tidak kehilangan pendengarnya. Ia mendiskusikan banyak hal, seperti politik, budaya dan juga masalah sosial. Bahkan dengan transformasi seni sinrilik yang ia lakukan, kini sinrilik dapat masuk dalam diskusi-diskusi kontemporer dan sosial masyarakat. “Dengan menggabungkan narasi masa lalu dan kehidupan sekarang, pembahasan dengan media sinrilik menjadi semakin menarik” tandasnya.

“Kalau ia dibawakan secara tradisional dengan standarnya itu, maka ia akan kehilangan audiensnya. Sinrilik bisa saja disampaikan dalam bahasa Inggris, Indonesia dan bahasa daerah lainnya. Jadi targetnya selain menghibur, orang juga paham apa yang kita sampaikan dan sekaligus secara persuasif mengingatkan kita kepada budaya lokal”.

Meskipun ada beberapa tanggapan sinis yang memang secara keras mengkritik apa yang dilakukannya, karena secara gamblang apa yang dilakukan oleh Arif terlihat seperti perubahan bentuk asli sinrilik. Namun ia menimpali bahwa akan menjadi masalah jika tetap bertahan dengan pola yang terkesan kolot tersebut, pada akhirnya budaya sinrilik pun akan hilang dengan sendirinya. Strategi bertahan yang ia tawarkan telah terbukti membawa sinrilik mampu masuk di beberapa kesempatan, seperti mimbar kuliah, ruang seminar, ruang kajian, bahkan ruang-ruang

yang sifatnya protokoler. Hadirnya budaya tutur sinrilik di ruang-ruang tersebut membawa warna tersendiri yang diharapkan akan mempertahankan kesenian sinrilik dari kepunahan.

Pada pembukaan konferensi internasional yang diadakan oleh Pusat Bahasa Universitas Negeri Makassar di awal Desember tahun lalu, Arif tampil menjadi pembawa acara dalam perhelatan ilmiah dua tahunan tersebut. Dengan iringan suara kesok-kesoknya yang mendayu-dayu, ia memberikan pengantar dalam tiga bahasa sekaligus; Inggris, Indonesia dan Makassar.

Kepiawaiannya dalam mengolah kata dan irama menarik perhatian mereka yang ada di ruang teater gedung phinisi UNM saat itu. Bahkan ketika candaan dan humor disampaikan dalam bahasa Makassar, hampir seluruh penonton tertawa terbahak-bahak, meski saya yakin banyak di antara mereka yang tidak paham dengan bahasa tersebut.

“Kami sendiri melihat media sinrilik sebagai cara menarik untuk menyampaikan pesan kebudayaan serta tujuan konferensi secara santai” jelas Ibu Masnijuri, ketua International Conference on Language Education (ICOLE 2015). Ia juga mengatakan bahwa budaya sinrilik ini menjadi salah satu asset yang harus dilestarikan. Sehingga ia perlu diberikan ruang sebagai apresiasi dan langkah nyata pelestariannya.

Dia akhir wawancara saya, Arif secara jelas mencoba menyadarkan kita bahwa yang namanya budaya itu tidak statis, namun sifatnya dinamis. Sehingga untuk mengatasi masalah kepunahan budaya, hanya soal bagaimana ia berkomunikasi dengan zaman tempat ia berada.

Berubah untuk dapat bertahan hidup merupakan jawaban yang masuk akal untuk tetap eksis. Namun, dengan melihat realitas dari minimnya panggung-panggung bagi para passinrilik untuk tetap tampil, akankah budaya sinrilik tetap eksis? Atau malah hanya mampu bertahan beberapa tahun lagi?

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah peserta Kelas Menulis Kepo. Tulisan ini juga dapat dibaca pada <http://ismailsmiler.wordpress.com>



# RESES

## Kesehatan Reproduksi

Oleh  
**SITTI ZAHARA & M. GHUFRAN H. KORDI K.**

**M**embaca judul tulisan di atas agak janggal. Namun, itulah yang terjadi antara konstituen dengan wakil mereka di parlemen. Adalah Hj. Siti Nurhan Rachman, anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Kendari, yang melakukan reses dengan pembicaraan utama mengenai kesehatan reproduksi. Ibu Nurhan, nama akrab anggota DPRD yang terpilih di Dapil (Daerah pemilihan) V Kota Kendari (Kecamatan Puuwatu dan Mandonga) ini merespon pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi, sekaligus menindaklanjuti usulan ibu-ibu yang hendak melakukan pemeriksaan *pap smear*.

Pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi, apalagi terkait dengan alat kelamin dan penyakit kelamin merupakan sesuatu yang masih tabu di kalangan masyarakat. Karena itu, penyakit-penyakit yang terkait reproduksi yang teridentifikasi umumnya setelah penderita dalam kondisi yang parah.

Pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi juga sangat terkait dengan budaya masyarakat patriarki, sehingga kebutuhan dan kepentingan perempuan ditentukan atau diputuskan oleh suami atau bapak. Tidak hanya penyakit yang harus diperiksa ke dokter atau di layanan kesehatan, keputusan melahirkan pun bergantung pada keputusan suami dan bapak. Dalam banyak kasus, perempuan meninggal karena terlambat diberi pertolongan oleh tenaga medis terlatih hanya karena menunggu kedatangan atau keputusan dari suami atau bapaknya.

### Inisiatif Kelompok Konstituen

Karena itu, ketika ada inisiasi masyarakat untuk membicarakan kesehatan reproduksi secara terbuka, apalagi hendak memeriksakan diri mereka maka bisa dianggap sebagai kemajuan yang luar biasa. Perubahan sikap dan budaya masyarakat terkait dengan kesehatan reproduksi tentu bukanlah sesuatu yang mudah dan cepat. Karenanya, jika perubahan itu terjadi lebih luas dan cepat, mestinya harus direspon secara cepat pula oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini negara/pemerintah.

Perubahan budaya masyarakat dalam melihat kesehatan reproduksi diperlukan, karena masalah kesehatan reproduksi tidak bisa dilepaskan dari perubahan pola hidup masyarakat saat ini. Penyakit yang terkait dengan organ reproduksi, seperti kanker serviks dan kanker payudara, pun terkait

dengan gaya hidup. Menurut Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO), bahwa 80 % penderita kanker serviks saat ini ada di negara-negara berkembang. Dibanding tahun 1980-an hingga 1990-an, penderita penyakit kanker—termasuk kanker serviks dan payudara—justu berada di negara-negara maju. Situasinya berbalik, karena pola hidup di negara-negara maju kini diadopsi di negara-negara berkembang, seperti pola makan tidak sehat, kelebihan mengonsumsi makanan siap saji, kelebihan mengonsumsi daging merah (sapi, kambing, kerbau, babi), kurang bergerak (kurang olahraga), merokok, dan minum alkohol.

Sementara pemicu kanker serviks yang asli di negara-negara berkembang adalah pernikahan dini (menikah di bawah 20 tahun) dan melahirkan terlalu banyak. Sampai saat ini, pernikahan dini merupakan masalah serius di Indonesia, karena menikah dini legal secara hukum, dan perempuan yang menikah dini atau muda, selalu melahirkan anak dalam jumlah banyak.

Parahnya, pernikahan dini dan melahirkan banyak anak selalu dilakoni perempuan miskin.

Pola makan di masyarakat berubah dengan cepat yang kemudian memicu meningkatnya kanker. Tetapi budaya masyarakat dalam melihat kesehatan reproduksi tidak berubah dengan cepat, sehingga mereka yang menderita penyakit yang berhubungan dengan reproduksi menjadi sulit terdeteksi dan tertangani.

Karena itu, jika pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi diinisiasi oleh masyarakat, apalagi masyarakat bawah seperti Kelompok Konstituen (KK) merupakan suatu kemajuan luar biasa yang patut diapresiasi. KK di Kelurahan Wuawua dan Watulonda Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mendiskusikan tema kesehatan reproduksi. Dalam diskusi tersebut muncul berbagai pengalaman perempuan yang mengidentifikasi dirinya atau diidentifikasi oleh dokter menderita kanker serviks dan kanker payudara.

Diskusi tentang kesehatan reproduksi di KK tidak hanya



Pengurus KK Kelurahan Wua-wua sedang melakukan registrasi untuk mendapatkan pemeriksaan *Pap Smear* di kantor BKKBN Provinsi Sultra. **Foto: Dok. Program MAMPU-BaKTI**

“ *Saya juga sempat takut dan gugup tetapi karena pemeriksaan ini penting bagi perempuan dan sebagai pengurus KK saya ingin memberi contoh kepada perempuan lain, khususnya di KK di Kelurahan Wuawua agar berani untuk memeriksakan kesehatan reproduksinya.* ”

membuka mata perempuan-perempuan itu mengenai penyakit-penyakit terkait dengan organ reproduksi, tetapi juga mendorong mereka untuk mencari jalan keluar. KK kemudian mendata perempuan-perempuan di dua kelurahan tersebut untuk memeriksakan kesehatan mereka.

### **Reses yang Berguna**

Melalui penguatan yang dilakukan oleh Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari dalam Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan), kerjasama dengan Yayasan BaKTI, KK menyiapkan diri untuk menyampaikan permasalahan yang teridentifikasi tersebut kepada wakil rakyat mereka di DPRD Kota Kendari.

KK dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh mereka, sehingga ketika berlangsung reses, sebagai konstituen mereka menyampaikan apa-apa yang dihadapi oleh mereka dan perlu direspon secara cepat oleh wakil rakyat yang mewakili mereka, maupun oleh instansi teknis.

Akhirnya, KK menyepakati untuk menyampaikan permasalahan kesehatan reproduksi kepada wakil mereka saat reses. Kesepakatan di KK sangat penting agar pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi menjadi fokus dan diusulkan untuk menjadi tindakan yang berguna untuk perempuan.

### **Respon APP**

Pada pelaksanaan reses 2 Juli 2015 yang dihadiri oleh Hj. Siti Nurhan Rachman, anggota parlemen perempuan (APP) di DPRD Kota Kendari dari Dapil V yang meliputi Kecamatan Puuwatu dan Mandonga, salah satu materi

pembicaraan adalah mengenai Kesehatan Reproduksi. Saat itu Ketua KK Kelurahan Watulondo, ibu Hasrianti menyampaikan aspirasi KK tentang masalah kesehatan reproduksi. Di depan Ibu Nurhan, ibu Hasrianti menjelaskan bahwa, di KK telah didiskusikan berbagai permasalahan yang dialami oleh warga, dan diantaranya yang perlu dituntaskan adalah masalah kesehatan reproduksi, karena beberapa perempuan telah diidentifikasi menderita kanker payudara dan kanker serviks. Dengan begitu perlu pemeriksaan terhadap ibu-ibu.

Karena usulan dari KK, maka diskusi yang berkembang pada Reses tersebut adalah mengenai Kesehatan Reproduksi. Pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi di pertemuan terbuka seperti Reses tersebut menjadi menarik, karena menjadi pembicaraan publik, yang sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang tabu.

Merespon usulan KK, ibu Nurhan bersedia memfasilitasi pemeriksaan pap smear dan tes IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) bagi perempuan yang bersedia. Ibu Nurhan akan menghubungkan perempuan-perempuan yang bersedia melakukan *pap smear* dan tes IVA dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari dan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Sulawesi Tenggara.

### **Masih Takut dan Malu**

Sekalipun kesehatan reproduksi sudah dibicarakan secara terbuka di dalam Reses wakil rakyat, namun ketika dilakukan pendataan untuk pemeriksaan *pap smear* dan tes IVA, hanya sebagian kecil perempuan yang bersedia melakukan pemeriksaan *pap smear*. Banyak





Kegiatan diskusi Kelompok Konstituen Kota Kendari. Foto: Dok. Program MAMPU-BaKTI

17 perempuan, 8 dari Kelurahan Wuawua dan 9 dari Kelurahan Watulonda yang bersedia melakukan pemeriksaan *pap smear*.

Dan ketika dilaksanakan pemeriksaan pap smear gratis pada 23 Agustus 2015 oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari dan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, tercatat sebanyak 8 orang hadir mengikuti tes pap smear. Jumlah ini lebih sedikit dari data yang diberikan dan setelah dikonfirmasi kepada pengurus KK, ternyata sebagian perempuan yang telah didata menyatakan takut dan jua malu.

Ibu Sri Soesilowati salah seorang yang ditemui di sela-sela kegiatan pemeriksaan pap smear mengatakan “Saya bersyukur bisa mengikuti tes *pap smear* ini karena tidak dibebankan biaya, karena kalau harus tes *pap smear* di dokter praktik saya harus mengeluarkan biaya sebesar Rp.400.000,-. Sebelum ikut tes *pap smear* ini, saya juga sempat takut dan gugup tetapi karena pemeriksaan ini penting bagi perempuan dan sebagai pengurus KK saya ingin memberi contoh kepada perempuan lain, khususnya di KK di Kelurahan Wuawua agar berani untuk memeriksakan

kesehatan reproduksinya. Saya akan berjanji akan menceritakan pengalaman saya pada perempuan di KK Kelurahan Wuawua.”

Tidak mudah bagi perempuan memberanikan diri untuk melakukan tes *pap smear* dan IVA. Membicarakan kesehatan reproduksi, apalagi terkait dengan kanker payudara dan serviks pun merupakan hal baru. Dengan kata lain, membicarakan kesehatan reproduksi secara terbuka bagi perempuan yang sekian lama berada dalam kungkungan budaya patriarki, sudah merupakan perubahan dan kemajuan yang luar biasa. Karena itu, ketika ada beberapa orang yang memberanikan diri melakukan tes *pap smear* adalah suatu perubahan yang besar.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Database & Publikasi Media Officer MAMPU-BaKTI dan dapat dihubungi melalui email [ghufran@bakti.or.id](mailto:ghufran@bakti.or.id)

# PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKTIF HARUS JANGKAU ANAK MUDA

Oleh **HARYANI DANNISA**



Ilustrasi **FG**

"Merasa dihakimi" adalah apa yang anak muda deskripsikan sebagai alasan untuk tidak datang ke tempat pelayanan kesehatan publik, atau bertanya pada orangtua mereka mengenai kesehatan seksual dan reproduksi.

**K** "enapa sih, sulit sekali mencari pekerjaan?"  
Sejak lulus kuliah dua bulan yang lalu, pertanyaan ini selalu bergema di kepala saya. Saya dan teman-teman sampai tak punya topik yang lebih menarik untuk dibicarakan selain semangat-- atau mungkin rasa takut--yang kami dapatkan ketika melamar kerja. Saat bertemu, percakapan kami hanya seputar "Bagaimana si A menderita di perusahaan B, atau bagaimana si C tiba-tiba bantingsetir ke industri D".

Namun, ada satu teman yang jadi pengecualian dari percakapan tersebut. Ia belum melamar kerja, bahkan belum pernah melakukan wawancara. Bukan karena ia memilih untuk langsung melanjutkan kuliah ke jenjang berikutnya, tapi karena ia harus mengurus anaknya.

Teman saya menikah di usia 18 tahun, tepat setelah ia sadar bahwa ia telah mengandung anak pacarnya. Jangan khawatir, dia dan keluarganya sekarang baik-baik saja. Namun, yang ingin saya bahas adalah bagaimana lima tahun yang lalu ia tidak memiliki pilihan lain -- dan bagaimana semua orang, termasuk saya, tidak menyadari bahwa seharusnya ada.

Lima tahun lalu, ketika kami berumur 18 tahun, tidak pernah terdengar oleh kami apa yang disebut dengan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (atau *Sexual Reproductive Health and Rights* dalam bahasa Inggris, yang kemudian disingkat jadi SRHR) -- yang apabila dapat diakses dengan mudah oleh remaja yang memiliki kasus sama seperti teman saya, dapat memberi mereka lebih banyak pilihan hidup.

Seharusnya, kami semua yang pada saat itu masih remaja dapat mengakses pelayanan SRHR, yang termasuk edukasi dan konsultasi tentang pemahaman seksual secara

komprehensif. Hak ini seharusnya dihargai dan pelayanannya diberikan oleh pemerintah tanpa pandang bulu. Tapi waktu itu kami tidak menemukan aksesnya, dan juga masih sulit didapatkan sekarang.

### **Jangan Bertanya, Jangan Beritahu**

Bagaimana anak muda seperti saya mengakses informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi? Karena penasaran, saya bertanya ke sana ke mari. Jawabannya, tentu saja, kebanyakan dari Internet, karena rasanya bodoh untuk bertanya pada orang lain sesuatu yang bisa kita temukan di Google, bukan?

"Dari nyokap.. alias ibu Google", kata satu teman, sebelum menertawakan kemustahilan bertanya ke orang yang lebih tua, apalagi ibunya, mengenai informasi kesehatan reproduksi. Satu teman lain, seorang laki-laki, berkata bahwa ia mendapat informasi-informasi ini dari situs Reddit.

Intinya, kami takut bertanya. Namun, ketika akhirnya kami memberanikan diri, mereka tidak mau memberitahu. Dari 15 orang yang menjadi kelompok responden kecil saya, ada satu teman yang bercerita bahwa ia pernah pergi ke suatu klinik untuk mendapatkan informasi seksual dan reproduksi. Teman saya ini, tentunya belum menikah, pergi ke seorang dokter kandungan di sebuah klinik untuk konsultasi mengenai suatu masalah yang ia alami. Ujungnya, ia dicap sebagai perempuan tidak baik dan dituduh telah berhubungan seks sebelum menikah. Ia kemudian mencari klinik lain, dan akhirnya menemukan suatu klinik yang ia sebut ideal karena "tidak menghakimi".

"Merasa dihakimi" adalah apa yang anak muda deskripsikan sebagai alasan untuk tidak datang ke tempat pelayanan kesehatan publik, atau bertanya pada orangtua mereka mengenai



kesehatan seksual dan reproduksi. Selain itu, banyak juga teman saya yang memegang prinsip tidak akan berhubungan seks sampai menikah. Menurut mereka, karena prinsip tersebut, mereka tidak butuh informasi SRHR sekarang. Mungkin beberapa tahun lagi.

Ini adalah akar dari banyaknya masalah kesehatan reproduksi di Indonesia: kesalahpahaman bahwa untuk mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, seseorang harus dinyatakan "aktif" berhubungan seks terlebih dahulu. Miskonsepsi ini, yang kemudian teraduk dengan unsur agama dan budaya, tidak mengakui aktivitas seks sebelum menikah, dan kemudian menyebabkan pelayanan SRHR hanya dibatasi pada pasangan yang sudah menikah. Ini tidak benar.

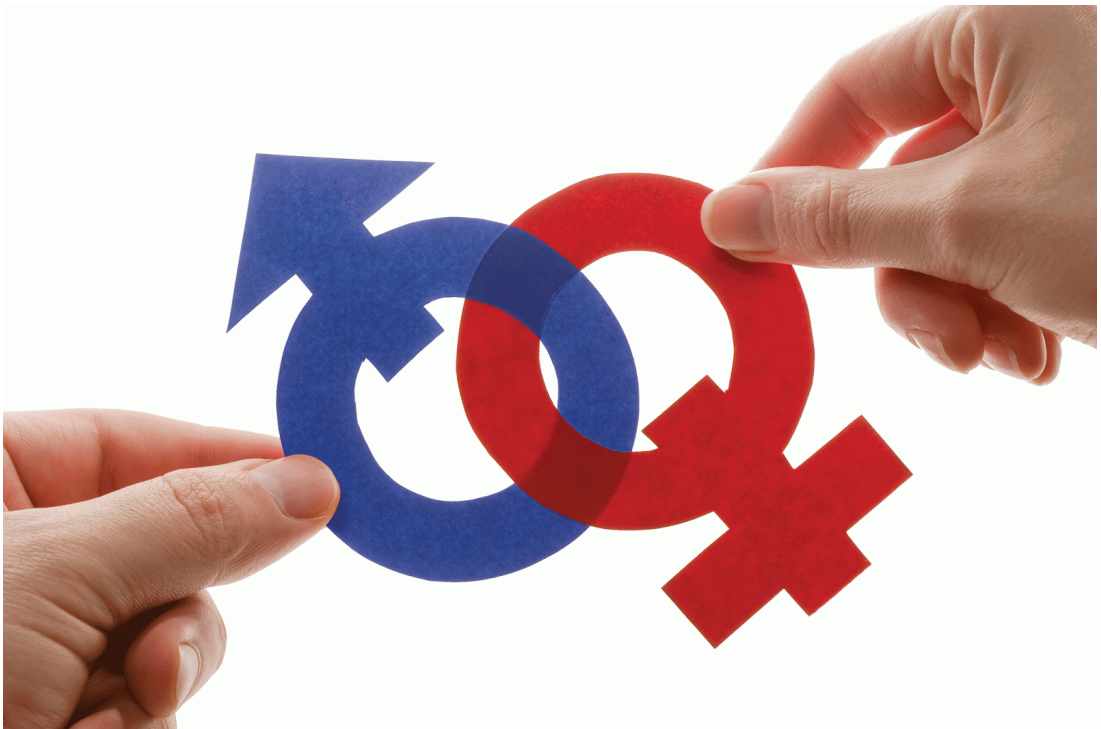
Pertanyaannya adalah, apabila batasan-batasan tersebut masih ada di kehidupan perkotaan, bagaimana dengan anak muda yang hidup di daerah terpencil di Indonesia? Apa yang harus mereka lewati ketika ingin mengakses pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi? Anak muda yang hidup di komunitas yang termarginalisasikan menghadapi batasan yang jauh lebih besar dari kita, batasan-batasan hasil stereotip gender dan budaya. Karena minimnya akses SRHR, mereka

jadi sasaran empuk pernikahan anak, kehamilan yang tak diinginkan, bahkan infeksi menular seksual.

Apalagi pendidikan seks dan pelayanan kesehatan preventif, ketika diberikan pada anak muda, hanya menjangkau mereka yang ada di sekolah. Sedangkan, menurut Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), presentase anak usia 16-18 tahun di daerah miskin yang dapat bersekolah hanya mencapai 43 persen. Hal ini menjelaskan mengapa 60 persen permasalahan kesehatan reproduksi di Indonesia terjadi pada remaja yang tidak sekolah, menurut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

Lucu bagaimana pelayanan kesehatan reproduksi di negara kita mengabaikan target utamanya. Padahal, anak muda di Indonesia merupakan golongan yang seharusnya dijaga agar dapat tetap produktif bekerja. Jika Anda seorang remaja Indonesia berumur 16 hingga 25 tahun seperti saya, Anda adalah bagian dari apa yang disebut Bank Dunia sebagai "bonus demografi".

Saat ini, jumlah kita mencapai angka 65 juta - generasi anak muda terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Artinya, kontribusi kita sangat penting bagi perkembangan perekonomian negara 15 tahun ke depan.





Penjelasan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja perlu ditingkatkan untuk meminimalkan terjadinya pernikahan usia dini dan kehamilan yang tidak diinginkan serta infeksi menular seksual.

**Foto : Dok. K4Health - USAID**

Selain masalah itu, rasio kematian ibu saat melahirkan di Indonesia telah meningkat dari 228 kematian per 100.000 kelahiran di 2007, menjadi 359 kematian di 2012, dengan sebagian besar ibu adalah wanita muda, bahkan remaja. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), jumlah aborsi meningkat 15 persen tahun lalu, dengan 800.000 dari totalnya dilakukan oleh remaja perempuan.

Untuk benar-benar menghapus batasan yang ada pada pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja, dibutuhkan suatu pendekatan holistik. Apapun yang dilakukan tidak akan signifikan tanpa adanya tindakan pemerintah menghapus semua hukum dan peraturan -- baik pada tingkat pusat ataupun daerah yang menghalangi akses ke pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja. Selain itu, harus ada pelatihan dan edukasi bagi petugas-petugas kesehatan yang bekerja di garis depan, seperti bidan, agar tidak diskriminatif pada remaja.

Kepercayaan agama dan budaya memang dapat membatasi aktivitas seksual seseorang, namun seharusnya keduanya tidak membatasi akses pada kesehatan seksual dan reproduksi, ataupun penegakan hak terhadapnya. Setiap remaja di Indonesia--menikah ataupun tidak--berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersahabat, dimana mereka dapat mengakses informasi dan mengajukan konsultasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dengan nyaman, tanpa merasa dihakimi.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini diambil dari Magdalene.com dan dapat dibaca pada link <http://magdalene.co/news-644-pelayanan-kesehatan-reproduktif-harus-jangkau-anak-muda.html>

Magdalene.com adalah sebuah media online yang berfokus pada isu gender dan budaya Indonesia.

# Sunat Perempuan Indonesia

Oleh **LIES MARCOES**



Ilustrasi **FG**



Siapa yang tak kaget ketika Unicef -Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak-meluncurkan hasil penelitian soal sunat perempuan. Menurut laporan itu Indonesia menjadi penyumbang ketiga tertinggi angka praktik sunat perempuan dunia.

**D**ata Unicef 2016 mencatat 200 juta perempuan dan anak perempuan mengalaminya, naik 60 juta dari data tahun 2014 yang mencatat ada 140 juta praktik sunat di dunia. Di Indonesia, menurut penelitian itu, separuh anak perempuan usia 11 tahun ke bawah mengalami sunat.

Keterkejutan itu wajar karena kita seperti tak melihat praktik itu di kiri-kanan kita. Berdasarkan pengamatan panjang, tulisan ini berupaya memberi konteks dalam memahami isu ini.

Tahun 1998 bersama Andree Feillard, peneliti dari Perancis, kami menulis artikel soal sunat perempuan di Indonesia untuk jurnal Archipel (vol 56/1998). Tulisan ini memperlihatkan bahwa praktik sunat merupakan gabungan adat dan proses inisiasi atau penanda keislaman di sejumlah daerah di Nusantara.

Saat penelitian dilakukan, sunat perempuan hanya tradisi komunal. Sunat dilakukan oleh dukun sunat dalam bentuk simbolik : ujung klitoris bayi/anak disentuh oleh kunyit atau menggunakan alat (pisau kecil, gunting, atau jarum). Di sejumlah daerah, seperti Sulawesi Selatan, ritual ini dirayakan keluarga dengan pesta adat. Maka, orang tahu ada hajatan sunatan anak perempuan. Namun, di banyak daerah, ritual itu hanya diketahui oleh ibu sang bayi dan dukun yang melaksanakan. Feillard

menyebut ritual itu bersifat "rahasia kecil" antar perempuan.

Ketika dunia mempersoalkan praktik itu dengan melihat akibat buruknya sebagaimana terjadi di Afrika Utara-utamanya Mesir, Sudan, Somalia, dan Etiopia-banyak pemerhati isu kesehatan reproduksi perempuan menengok ke Indonesia mengingat praktik ini banyak terjadi di negara-negara Islam. Sejumlah penelitian dilakukan, misalnya oleh Yayasan Kesejahteraan Fatayat. Penelitian-penelitian itu melihat bahwa sunat perempuan tak hanya dilakukan oleh peraji/dukun, tetapi juga oleh bidan atau petugas kesehatan. Penelitian itu juga melihat dampak kesehatannya. Kesimpulannya, sunat dilakukan dengan sejumlah kasus kecil infeksi, tetapi secara umum tak ada persoalan pada kesehatan reproduksi perempuan sebagaimana praktik di Afrika.

### Pro dan Kontra

Persoalan lebih mendasar ada di level diskursus dan debat teologis. MUI mengeluarkan fatwa bahwa sunat perempuan adalah hal baik dan dianjurkan. Namun, para aktivis perempuan dan pemerhati hak kesehatan reproduksi perempuan merasa bahwa alasan diskursus sangat memojokkan dan merendahkan perempuan. Alasan yang mengemuka adalah: sunat dilakukan dalam rangka mengontrol seksualitas dan libido seks

mereka. Ini jelas persoalan. Seks perempuan hendak dikontrol karena dianggap buruk dan liar.

Debat pro dan kontra makin mengemuka ketika pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010 mengatur tata laksana sunat perempuan agar memenuhi standar kesehatan. Peraturan ini merespons berkembangnya praktik sunat yang ternyata tak hanya dilakukan oleh peraji di level komunitas, tetapi juga petugas kesehatan sebagai bentuk layanan medis atas permintaan pihak keluarga.

Munculnya "permintaan" itu secara sosiologis sejalan dengan menguatnya kehendak untuk beragama secara penuh. Itu berarti ada peningkatan anggapan bahwa sunat perempuan bukan sekadar tradisi budaya, tetapi menjadi bagian ajaran agama.

sunat itu diambil alih oleh lembaga pemberi layanan kesehatan, seperti rumah sakit atau dilakukan bidan, maka konsekuensinya ada tindakan operasi. Tindakan perlukaan, bagaimana pun bentuknya, adalah tindakan operasi. Ini berarti sunat bukan lagi tradisi yang dilakukan simbolik, tetapi tindakan medis.

Pemerintah, melalui Kemenkes menyadari kekeliruan intervensi mereka dalam praktik medikalisasi sunat perempuan itu. Karenanya, Kemenkes melalui Peraturan No 6/2014 mencabut Peraturan Kemenkes sebelumnya No 1636/2010. Namun, hal ini tak dengan sendirinya mengakhiri praktik itu.

Tahun 2014 wartawan CNN, Saima Mohsin, melaporkan dari Bandung dalam satu hari ratusan bayi "disunat" dalam rangka ulang tahun sebuah RSB. Dan, praktik serupa itu

***Pemerintah, melalui Kemenkes menyadari kekeliruan intervensi mereka dalam praktik medikalisasi sunat perempuan itu. Karenanya, Kemenkes melalui Peraturan No 6/2014 mencabut Peraturan Kemenkes sebelumnya No 1636/2010.***

Tentu saja tak semua mazhab menganut pandangan itu. Dalam tradisi pemikiran keagamaan yang lebih puritan (pemurnian), sunat perempuan bahkan tak dikenal sebagai bagian dari ajaran agama melainkan bagian tradisi budaya. Oleh karena itu, Muhammadiyah menolak praktik sunat perempuan.

Pada perkembangannya, Permenkes yang semula dimaksudkan untuk mengawasi dan mengontrol tata laksana sunat agar tak memunculkan persoalan medis, dibaca lain oleh pihak berbeda. MUI, misalnya menerima peraturan itu sebagai bukti bahwa negara merestui. Di sini permenkes menjadi kontroversial di tengah meluasnya praktik medikalisasi sunat perempuan.

Dengan alasan untuk memenuhi permintaan konsumen, sejumlah rumah sakit bersalin (RSB)-apalagi yang berbendera agama-memberi layanan paket sunat dan tindak sebagai bonus melahirkan. Dan, ketika praktik



menjadi hal yang biasa sebagai paket layanan kesehatan. Tidak mengherankan bahwa praktik sunat perempuan ada dan meluas di Indonesia.

Namun, sebagaimana dikemukakan Feillard, praktik itu tak banyak diketahui orang karena dianggap sebagai peristiwa biasa. Saking biasanya bahkan seorang ayah bisa tak tahu apakah anak perempuannya disunat atau tidak. Praktik ini menguat ketika ada permintaan "pasar" yang dijawab dengan komersialisasi layanan medis.

Di titik ini laporan Unicef jelas sebuah fakta sosial yang perlu disikapi. Indonesia menjadi penyumbang ketiga praktik sunat perempuan ketika sunat bukan lagi sekadar tradisi melainkan telah menjadi bagian dari layanan medis yang berbiaya dan menguntungkan lembaga layanan.

Dalam waktu yang bersamaan masyarakat sedang gandrung meng-agama-kan hal-hal yang semula "hanya" tradisi, seperti sunat perempuan itu. Maka, sikap paling arif adalah menjadikan fakta itu penanda arah dan bagaimana negara bersikap dalam menghormati hak reproduksi anak perempuan dan perempuan, seperti yang telah disepakati dalam Konferensi Beijing.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Ibu Lies Marcoes adalah Direktur Rumah Kita Bersama.  
Arikel ini diambil dari KOMPAS, terbit tanggal 18 Februari 2016







Update MAMPU BaKTI

# Tidak Selalu Menunggu Uluran Tangan Negara

Catatan tentang Kelompok Konstituen  
di Mataram dan Lotim

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

◀ Pembentukan kelompok konstituen (KK) yang difasilitasi oleh Program MAMPU - BaKTI sebagai wadah penguatan dan pengorganisasian masyarakat agar mampu mengadvokasikan hak-hak mereka. **Foto: Dok. Program MAMPU-BaKTI**

---

Dalam konsepsi HAM (Hak Asasi Manusia) negara adalah pihak yang berkewajiban sebagai penanggung jawab (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak asasi warga negara, terutama hak-hak dasar: pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pemukiman. Namun, negara tidak selalu mampu memenuhi hak-hak dasar warga negaranya.

**D**i samping alasan kemampuan negara yang terbatas, yang selama ini selalu menjadi biang negara mengabaikan hak-hak warganya, aparat pemerintah sebagai representasi negara juga gagal membuat dan merencanakan program yang selalu sesuai dengan kebutuhan warga negara. Pada tingkat implementasi, banyak sekali program yang tidak tepat sasaran, atau sengaja dibelokkan oleh aparat pemerintah untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya.

Karena itu, warga negara tidak selalu harus menunggu “uluran tangan” dan “kebaikan negara”. Warna negara harus menuntut pada negara untuk agar melaksanakan tanggungjawabnya. Jika warga negara mendiamkan situasi dan nasibnya, maka negara pun semakin melupakan tanggungjawabnya. Di sisi lain, aparat pemerintah yang merupakan representasi negara dan dibayar negara untuk melayani warga negara, yang sudah terbiasa membelokkan kebijakan dan program, akan semakin menjadi aparat yang tidak

bertanggungjawab, dan memanfaatkan posisinya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, serta merugikan negara.

Namun, tidak semua warga negara dapat menuntut hak-haknya kepada negara atau menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mendasar mereka. Karena itu, diperlukan penyadaran kritis dan penguatan kepada rakyat agar mereka dapat membangun kekuatan dan kebersamaan.

Pengalaman pembentukan kelompok konstituen (KK) yang difasilitasi mitra Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) dalam Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) sebagai wadah penguatan dan pengorganisasian masyarakat agar mampu mengadvokasikan hak-hak mereka, menjadi pembelajaran yang baik, tidak hanya untuk advokasi kepada negara, tetapi juga membangun solidaritas dan kerjasama untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.



KK juga dapat menyampaikan keberatan kepada pemerintah, jika bantuan sosial dari pemerintah tidak tepat sasaran. **Foto: Dok. Program MAMPU-BaKTI**

## Membantu Sesama

Pengurus KK di Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, mendaftarkan warga miskin di kelurahan tersebut yang selama ini tidak mendapatkan bantuan sosial dari negara, seperti Raskin (beras miskin), BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat), dan PSKS (program simpanan kesejahteraan keluarga). Data-data tersebut disampaikan ke pemerintah setempat, dari tingkat Lurah, Camat, hingga Kepala Dinas Sosial.

KK juga menyampaikan keberatan kepada pemerintah, karena di antara penerima bantuan sosial dari pemerintah adalah warga yang kondisi ekonominya lebih baik, sehingga tidak pantas menerima bantuan. Pemerintah (lurah dan camat) merespon keberatan KK tersebut, dan mengubah data yang ada, namun hal ini dibicarakan secara terbuka antara KK, pemerintah kelurahan, dan masyarakat sehingga pihak-pihak yang ada dapat menerimanya.

Hal yang sama dilakukan oleh pengurus KK Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Namun, keberatan mereka adalah mengenai kualitas Raskin. Mereka mendatangi Bulog Lombok Timur dan menyampaikan tentang kualitas Raskin yang diberikan kepada warga miskin, yang kualitasnya sangat buruk. Menurut Subhan, salah satu pengurus KK Lenek, Raskin yang dibagikan sangat buruk sehingga ayam pun tidak memakannya. Setelah dua kali mereka menyampaikan keberatan ke Bulog, Raskin yang dibagikan sudah baik. Mereka juga minta kepada masyarakat yang memperoleh Raskin yang jelek agar dapat melaporkan ke KK.

Sementara pengurus KK di Kelurahan Aikmel, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, menerima dan mendampingi kasus-kasus yang dialami warga di kelurahan tersebut. Kasus-kasus yang masuk dibicarakan dan dicari jalan keluarnya. Kasus yang banyak diterima adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta



kasus penceraian di mana suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikan dan tidak menafkahi anak-anaknya.

Sebagian kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di rumah, di mana pelaku adalah suami, dapat diselesaikan oleh KK. Begitu juga kasus kekerasan terhadap anak di sekolah yang bisa difasilitasi oleh KK. Sementara beberapa kasus lain yang berkategori berat diteruskan ke proses hukum dengan terus didampingi oleh pengurus KK.

Menurut Sumiyati, Ketua KK di Kelurahan Aikmel, pelaku-pelaku kekerasan, apakah itu suami atau guru, akan berpikir seribu kali jika hendak melakukan kekerasan, jika di dalam masyarakat ada pihak-pihak yang peduli terhadap kekerasan tersebut. Korban mempunyai tempat untuk mengadu dan didampingi, sehingga pelaku atau calon-calon pelaku tidak semena-mena, atau bahkan ada calon pelaku yang tidak berani lagi melakukan kekerasan.

### Sosialisasi BPJS Secara Mandiri

Pengurus KK Dasan Agung, Kecamatan Mataram, Mataram menginisiasi sosialisasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) secara mandiri. Inisiasi ini bermula dari meninggalnya seorang perempuan miskin yang melahirkan dan terlambat diberi pertolongan, karena terlambat dibawa ke rumah sakit. Ketika hendak dibawa ke rumah sakit, keluarga si ibu yang hendak melahirkan bertanya ke Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Mataram, apakah Kartu BPJS dapat digunakan untuk rawat inap? Jawaban yang didapatkan tidak jelas. Setelah sampai di rumah sakit, ternyata pihak rumah sakit menyatakan bisa! Namun malang, karena terlambat dibawa, si ibu akhirnya meninggal dunia.

Kasus ini menjadi pembicaraan di KK Dasan Agung, sehingga kemudian diputuskan untuk mensosialisasikan JKN-BPJS kepada KK dan warga di Dasan Agung. Pengurus KK urunan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menghadirkan narasumber dari BPJS, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Kota Mataram. Menurut Hirsan Taqdir, Ketua KK Dasan Agung, warga dapat berswadaya dan bergotong-royong untuk melakukan sendiri jika terkait dengan kebutuhan dan kepentingan warga, asalkan ada yang mau menggerakkan dan mengorganisir.

Hirsan Taqdir menjelaskan bahwa, pengurus KK Dasan Agung telah bersepakat untuk mengelola KK tersebut secara mandiri dan berswadaya. Tidak

selalu menunggu uluran tangan dari pihak luar, termasuk pemerintah. Karena jika hanya menunggu pihak luar, maka tidak ada kemajuan dan keswadayaan.

### Membuat Blog untuk Penyadaran

Di KK Surya Bersuara, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, semua kegiatan diunggah ke blog sebagai media untuk pertukaran informasi. Menurut Adi, Ketua KK Surya Bersuara, ide membuat blog tersebut berasal dari pengalamannya bahwa, suara masyarakat kecil sulit sekali dijadikan berita oleh media konvensional, sekalipun berita itu penting. Dengan adanya blog yang dibuat oleh KK, diharapkan setiap anggota KK dan masyarakat dapat memasukkan setiap informasi yang merupakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Bagi Adi yang membuat dan mengelola blog yang bisa diakses pada <http://kelompokkonstituen.wordpress.com> tersebut, adalah masyarakat tidak hanya mengeluh dengan kondisi yang ada, tetapi harus melakukan sesuatu sekalipun itu sangat kecil, dan jika bermanfaat maka harus dibagi kepada orang lain. Blog ini diharapkan menjadi media untuk berbagi segala sesuatu yang bermanfaat itu.

Sekalipun isinya masih sangat sedikit, yang terpenting adalah masyarakat mempunyai kesadaran bahwa, perlu ada perubahan dan terobosan dalam memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan bersama. Masyarakat tidak selalu menunggu apa-apa yang berasal dari pihak lain, tetapi berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi dirinya maupun oranglain.

Negara harus terus diadvokasi untuk memenuhi tanggungjawabnya, namun rakyat juga diberi penguatan untuk meningkatkan kemandirian dan keswadayaan. Karena rakyat yang mandiri, berswadaya, dan kuat akan menjadi kekuatan untuk mengimbangi negara, sehingga negara tidak dibajak dan dibelokkan oleh penguasa.

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Database & Publikasi Media Officer MAMPU-BaKTI dan dapat dihubungi melalui email [ghufran@bakti.or.id](mailto:ghufran@bakti.or.id)





Australia Awards

Make a difference with  
an Australian Awards  
Scholarship  
*Applications are now open*

Open date: 1 February 2016

Closing date: 31 March 2016

For further information

Website: [www.australiaawardsindonesia.org](http://www.australiaawardsindonesia.org)

Email: [info@australiaawardsindonesia.org](mailto:info@australiaawardsindonesia.org)

Telp: +62 21 527 7648

[www.australiaawardsindonesia.org](http://www.australiaawardsindonesia.org)





**Australia Awards**

**Ciptakan perubahan  
melalui Australia  
Awards Scholarships**  
*Pendaftaran kini dibuka*

Tanggal pembukaan: 1 Februari 2016

Tanggal penutupan: 31 Maret 2016

**Untuk informasi lebih lanjut**

Website: [www.australiaawardsindonesia.org](http://www.australiaawardsindonesia.org)

Email: [info@australiaawardsindonesia.org](mailto:info@australiaawardsindonesia.org)

Telp: +62 21 527 7648

[www.australiaawardsindonesia.org](http://www.australiaawardsindonesia.org)



# Menciptakan Mata Air Baru di Tengah Serbuan Mesin Galian

Oleh **BAIQ TITIS YULIANTY**



**B**eberapa kali mengikuti kegiatan Konsorsium Hijau Lombok Tengah, khususnya di Desa Wajegeseng ada cerita yang selalu terselip di sesi presentasi, yakni cerita seorang petani bernama Hanafi yang memulihkan sumber mata air di lahannya setelah tidak mengalirkan air sebagai akibat dari aktivitas tambang galian tipe C. Saya tertarik dengan cerita itu, dan meluangkan waktu untuk dapat berkunjung kembali ke Desa Wajegeseng. Untuk bisa bertemu dengan Pak Hanafi, oleh Manager Area Konsorsium Hijau Lombok Tengah saya dihubungkan dengan Pak Mansur, salah seorang Kepala Dusun di Desa tersebut sekaligus anggota Pandu Tanahair. Pak Mansur inilah yang selanjutnya menemani perjalanan saya menuju dusun Lendang Pengkores, lokasi rumah pak Hanafi.

Disepanjang perjalanan Pak Mansur menceritakan sejarah Desa Wajegeseng, dari cerita beliau disebutkan bahwa Wajegeseng berdiri pada Tahun 1969, yaitu sebagai salah satu desa hasil pemekaran dari Desa Bebuak

Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Kata Wajageseng merupakan pengabdian julukan seorang pejuang yang membuka wilayah pemukiman dulu ketika merambah hutan belantara Beliau adalah LALU UMAR BIN RADEN SINGAREP, yang mana ketika merintis wilayah pemukiman selalu berhadapan dengan tantangan dan hambatan yang bahkan tidak terlepas dari bentrokan fisik dengan pihak lain yang tidak setuju untuk diadakan perluasan wilayah, tapi dengan jiwa dan keberanian beliau waktu itu, demi terjaminnya kebutuhan masyarakatnya untuk tempat tinggal waktu itu, sehingga beliau rela berjuang walaupun harus meneteskan darah sekalipun, sehingga karena keberanian dan perjuangannya itulah maka beliau dijuluki Wajageseng, adapun yang dimaksudkan dengan sebutan Wajageseng yaitu suatu perlambang keperkasaan karena besi baja atau waja (sebutan masa itu) bila dibakar atau dipanaskan dia akan semakin keras dan kuat.

Obrolan kami pun terus berlanjut tentang kondisi desa saat ini, dimana mata pencaharian

---

Kolam-kolam raksasa, eks lokasi tambang penggalian Tipe C, terlihat di sepanjang jalan menuju Dusun Lendang Pengkores. **Foto : Dok. Yayasan BaKTI**





Pemandangan berbeda akan kita temui ketika memasuki Dusun Lendang Pengkores, di sisi kiri dan kanan jalan terlihat kolam-kolam raksasa, eks lokasi tambang penggalian Tipe C. Serta beberapa lokasi yang dalam proses pengerukan. Sesekali terlihat eskavator parkir di areal itu, serta satu perusahaan pemecah batu (*crusher*) berdiri di lokasi tidak jauh dari pemukiman warga.

penduduk desa sangat tergantung pada pertanian. hal itu tidak mengherankan karena Wajegeseng memiliki lahan pertanian sawah seluas 337 Ha dan perkebunan seluas 359 Ha. Dengan dominasi topografi datar berombak (hampir 90% dari luas wilayahnya). Begitu memasuki Desa Wajegeseng hingga dusun Lendang Telaga dikiri kanan kita disuguhkan pemandangan persawahan yang hijau terhampar luas diselingi dengan rumah penduduk yang terjejer dipinggir jalan. Akan tetapi pemandangan berbeda akan kita temui ketika memasuki Dusun Lendang Pengkores, di sisi kiri dan kanan jalan terlihat kolam-kolam raksasa, eks lokasi tambang penggalian Tipe C. Serta beberapa lokasi yang dalam proses pengerukan. Sesekali terlihat eskavator parkir di areal itu, serta satu perusahaan pemecah batu (*crusher*) berdiri di lokasi tidak jauh dari pemukiman warga. Pasir, kerikil, batu-batu yang sudah dipecah hingga batu berukuran besar berjejer di tepi jalan. Sayangnya, tidak satupun pekerja yang bisa saya temui karena saya melintasi jalan tersebut tepat tengah hari, saat pekerja sedang kembali kerumah untuk beristirahat.

Jika dilihat dari luas lahan yang telah dikeruk dan mobilitas truk pengangkut yang cukup ramai pasti akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penambahan pendapatan desa dari retribusi. Akan tetapi kenyataannya hingga saat ini belum ada kajian terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai kontribusi adanya tambang galian tersebut di Desa Wajegeseng dan pihak pemerintah desa pun belum pernah menetapkan aturan retribusi bagi truk pengangkut (dam) yang melintasi desa.

Kondisi yang lebih menonjol dari dampak aktifitas tambang tersebut adalah beberapa ruas jalan di desa rusak parah karena kapasitas jalan yang tidak memadai untuk dilintasi truk

pengangkut, selain itu kerusakan lingkungan mulai terasa, polusi debu ketika musim kemarau berdampak pada menurunnya kualitas udara serta temperatur yang semakin tinggi. Dampak ini semakin diperparah karena ada beberapa sumber mata air (*engger*, istilah masyarakat setempat) di sekitar lokasi penambangan sudah tidak mengalirkan air lagi. Hal yang paling ironis adalah, pemilik lahan menjadi kuli di tanahnya sendiri.

Akhirnya kami sampai di kediaman Pak Hanafi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit dari Kantor Desa Wajegeseng dan melewati jalanan terjal berbatu sisa lokasi penggalian, perlu ekstra hati-hati terlebih lagi jika menggunakan kendaraan roda empat. Karena jalan cukup labil setelah diguyur hujan sehari sebelumnya.

Kami disambut dengan hangat oleh Pak Hanafi dan dipersilakan untuk masuk namun kami lebih memilih duduk di berugak yang terletak di belakang rumah karena udara cukup segar yang dikelilingi oleh pohon bambu dan pohon mahoni. Setelah mengutarakan maksud kedatangan kami, Pak Hanafi pun langsung menceritakan pengalamannya di tahun 2009.

Menurut pengakuannya, pada awalnya Ia hanya ikut-ikutan saja karena lahan milik warga di sekitar lahannya sudah dikeruk dan menjadi lebih rendah. Selain itu, tuntutan kebutuhan rumah tangga yang dirasakannya semakin sulit untuk ia penuhi, sehingga Ia memutuskan untuk menggali lahan yang dia miliki kepada perusahaan yang juga membeli lahan lainnya milik warga desa. Saat itu material seperti pasir dan kerikil dijualnya dengan harga Rp. 15.000/truk dan batu yang berukuran besar dia pecah menjadi batu kecil berdiameter 3-4 cm. Yang akan dia jual ke perusahaan itu dengan harga Rp. 80.000/dam. Jika kondisi badan sedang fit, Pak Hanafi bisa memecah batu hingga 1 dam sehari. Namun tidak dipungkiri,



Deretan pohon Sengon, Mahoni dan Jati yang tumbuh subur dan mulai meninggi di lahan yang dulunya kering.

**Foto : Dok. Yayasan BaKTI**

seringkali degub jantung terganggu akibat getaran palu saat memecah batu, namun karena dorongan kondisi ekonomi Pak Hanafi tetap bertahan.

Dalam kurun waktu dua bulan, lahan seluar 50 are habis dikeruk hingga menyisakan kolam berukuran besar, yang hanya terisi jika musim penghujan datang. Kondisi ekonomi keluarga tidak ada perubahan karena apa yang diperoleh hanya cukup memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Jika melihat lahan miliknya, dia juga bingung apa yang bisa dilakukan. Sebelumnya dia membayangkan, jika tanah kebun miliknya dikeruk maka bisa beralih fungsi menjadi sawah karena akan mudah untuk diairi. Tetapi setelah proses pengerukan selesai, alih fungsi itu tidak bisa dilakukan karena struktur tanah berkarang yang tidak bisa menyimpan air dan sumber mata air (*engger*) di lahan yang diandalkan sebagai sumber irigasi untuk lahannya juga ternyata mati. Tidak ada setetes air pun yang keluar.

Bapak dua anak ini pun putus asa dan memilih membiarkan lahan tersebut begitu saja. Setelah beberapa bulan berlalu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memberikan sumbangan bibit beberapa jenis pohon seperti mahoni, sengon dan jati kepada masyarakat. Pak Hanafi pun tertarik dan mencoba menanam bibit tersebut dilahannya dengan tanaman selingan kacang tanah. Tanpa

dia ketahui bahwa tanaman kacang sebenarnya adalah satu jenis tanaman yang sangat baik bagi tanah karena dapat mengikat unsur N dalam tanah. Lama kelamaan pohon Sengon, Mahoni dan Jati yang ditanamnya tumbuh subur dan mulai meninggi. Seperti ada harapan baru tumbuh dalam dirinya saat melihat tanaman yang hijau dilahan yang sebelumnya tandus itu.

Lima tahun telah berjalan, ketika Pak Hanafi berkunjung ke lahan yang kini lebih pantas disebut kebun dengan maksud untuk mengambil daun dan rumput untuk pakan ternak sapi. Dia melihat lokasi *engger* yang sebelumnya kering kini mulai basah, air keluar kembali. Semakin hari debitnya semakin besar, sehingga oleh Pak Hanafi dibuatkan bak penampung berdiameter 1 m<sup>2</sup>. Kini air tersebut menjadi sumber kehidupan bagi 15 KK di sekitar areal kebun dan sudah dilengkapi dengan pipa untuk mengalirkan air menuju rumah penduduk. “saya tidak mau lagi seperti dulu, lebih baik sekarang saya tanam lagi. Hitung-hitung jadi tabungan buat anak-anak sekolah nanti” ungkap Pak Hanafi mengakhiri ceritanya.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Field Officer NTB untuk Program MCAI - BaKTI dan dapat dihubungi melalui email : [titisyulianty@bakti.or.id](mailto:titisyulianty@bakti.or.id)



## Referensi

---



### **Panduan Participatory Assessment (PA)**

Kajian Keadaan Pedesaan secara Partisipatif dengan penggunaan pendekatan *Participatory Assessment* (PA), dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan percaya diri masyarakat dalam mengidentifikasi serta menganalisa situasinya, baik potensi maupun permasalahannya. Ini sangat berbeda dengan pendekatan *'top-down'* yang sering dipakai oleh lembaga-lembaga yang hanya mengumpulkan informasi untuk kelancaran program mereka. Dalam program seperti itu, lembaga menentukan apa yang akan dikerjakan dalam suatu wilayah, masyarakat yang diikuti tanpa diberikan pilihan apapun. <http://www.batukarinfo.com/referensi/buku-panduan-participatory-assessment-pa>



### **Panduan Kabupaten dan Kota Ramah HAM**

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban dan tugas terlibat aktif dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Tanggung jawab ini tidak saja menjadi tugas dan kewajiban pemerintah pusat, Komisi Nasional (Komnas) HAM dan kelompok masyarakat sipil. Amanat itu tertuang dalam Kovenan HAM Internasional, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. <http://www.batukarinfo.com/referensi/panduan-bagi-kabupaten-dan-kota-ramah-ham>

## Artikel

---

### **Perspektif Kebudayaan untuk Pedesaan**

Oleh: Kacung Marijan

Titik balik arah pembangunan di pedesaan memperoleh momentum setelah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan munculnya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. UU Desa mengakui dan memberikan otoritas lebih besar kepada desa dalam mengelola dirinya, termasuk merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan. Selain itu, seperti tertuang dalam Pasal 72, desa juga memperoleh jaminan berkaitan dengan sumber keuangan dari pusat (APBN) atau pun dari kabupaten dan provinsi.

Payung hukum semacam itu diperkuat gagasan pemerintahan Jokowi-Kalla, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, termasuk dari desa. Upaya mendobrak pembangunan yang sentralistik melalui model pembangunan yang terdesentralisasi, yang mulai dilakukan sejak 2000-an, diperkuat dengan langkah-langkah yang lebih konkret. Kebijakan desentralisasi memang telah memungkinkan adanya perencanaan dan implementasi pembangunan yang berbasis pada daerah. Namun, sejak satu setengah dekade implementasinya belum mampu membuka ruang bagi adanya pembangunan yang lebih adil. Kebijakan itu memang telah menguntungkan daerah, tetapi tidak semua daerah memperolehnya.

<http://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/perspektif-kebudayaan-untuk-pedesaan>





17 Februari 2016

### Kunjungan Belajar tentang Manajemen Perpustakaan

Sebagai bagian dari rencana strategi paska proyek AgFor untuk mendirikan pusat informasi tentang pertanian, agroforestri dan kehutanan yang dapat diakses oleh petani dan penyuluh di tingkat kecamatan, Agfor Sulawesi Selatan mengadakan kunjungan belajar mengenai Manajemen Perpustakaan ke BaKTI Makassar. Tujuan kunjungan ini adalah untuk belajar mengenai cara pengelolaan perpustakaan yang lebih inovatif dan kreatif sehingga mampu meningkatkan daya kreasi dan pengetahuan para pengelola perpustakaan BP3K Kabupaten Bantaeng yang nantinya dapat menciptakan

perpustakaan di tingkat BP3K sebagai pusat informasi yang menarik untuk dikunjungi oleh petani maupun penyuluh. Kunjungan diikuti oleh 10 orang pengelola perpustakaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di kabupaten Bantaeng berasal dari BP3K Sinoa, Eremerasa, Bantaeng, Dampang dan Tompo Bulu yang didampingi oleh staf proyek Agroforestri (Agfor) Endri Martini. Pustakawan BaKTI, Sumarni Arianto menjadi narasumber yang membawakan materi dan berbagi pengalaman pengelolaan perpustakaan di BaKTI. Di akhir kegiatan, BaKTI dan AgFor saling bertukar cinderamata. Tak lupa ke 10 peserta dari BP3K tersebut mendaftarkan diri menjadi Sahabat BaKTI agar setelah kegiatan ini bisa tetap terhubung dengan BaKTI melalui milis dan juga media komunikasi BaKTI lainnya.

19 - 21 Februari 2016

### Social Enterprise Leadership Training

British Council berkolaborasi dengan Yayasan BaKTI menyelenggarakan kegiatan "Social Enterprise Leadership Training" di ruang pertemuan BaKTI Makassar sebagai bagian dari program British Council, Skills for Social Entrepreneurs. Pelatihan ini ditujukan bagi mereka yang berdomisili di kawasan timur Indonesia yang berkecimpung dalam usaha sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta menjadi lebih peduli dan percaya diri sebagai pemimpin di komunitas, memperkuat kemampuan peserta berkomunikasi dan membangun hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal dan melihat keberagaman untuk mengembangkan social enterprise di komunitas lebih kuat, serta meningkatnya pemahaman terhadap social enterprise serta potensi/peranan yang bisa dilakukan dalam pengembangan komunitas yang berkelanjutan seperti mengidentifikasi resiko, acrobat (juggling), going beyond resources, dan lain-lain. Sebanyak 37 peserta mengikuti pelatihan ini berasal LSM, komunitas, akademisi, dan sektor swasta.

25 Februari 2016

### Diskusi Media "Peluang dan Tantangan Ekonomi Sulawesi Selatan Menghadapi MEA

Sulawesi Selatan memiliki peluang besar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata nasional. Hal ini terungkap dalam Diskusi yang digelar Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) bekerjasama dengan Yayasan BaKTI. Dalam diskusi, Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri, Dendi Ramdani, mengatakan diperlukan strategi khusus mengoptimalkan kesiapan Sulsel antara lain mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas SDM dan produktivitas manufaktur. Diskusi diikuti oleh 63 peserta. Hadir pula sebagai pembicara: Ketua Asosiasi Kakao Sulsel Indonesia, Yusa Rasyid Ali; Deputy Direktur Perizinan Informasi dan Komunikasi OJK Wilayah VI Sulampua, Sabaruddin; Kepala Divisi Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Miyono; dan Pengamat Ekonomi Sulsel, Hamid Paddu.

Ruang pertemuan di BaKTI dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan organisasi Anda. Hubungi kami melalui email [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id) atau telepon 0411-833383/832228



## Laporan Pembelajaran Seri Lokakarya Komunikasi 2014

**PENERBIT** Knowledge Sektore Initiative bekerjasama dengan  
Kementrian PPN/BAPPENAS

Bagaimana mengemas serta mengkomunikasikan hasil penelitian untuk berbagai khalayak sasaran dalam bentuk tulisan populer, branding, relasi dengan media mendasari Knowledge Sektore Initiative menyelenggarakan seri Lokakarya Komunikasi 2014. Laporan ini merekam proses pembelajaran selama lokakarya dan kegiatan penguatan kapasitas peserta dan diharapkan dapat memberi inspirasi untuk menerapkan keterampilan mengemas hasil penelitian untuk proses pengambilan kebijakan.



## Panduan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat di Desa

**PENERBIT** Oxfam

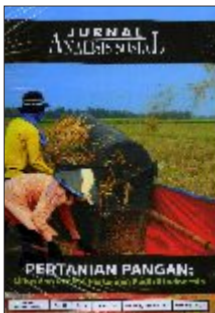
Panduan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRBBM) di tingkat desa ini adalah merupakan satu panduan yang dirancang untuk menyediakan panduan bagi upaya melakukan replikasi model dari program Membangun dan Memperkuat Ketangguhan terhadap bencana di Indonesia timur. Panduan dikembangkan berdasarkan pembelajaran dan pengalaman praktik yang dimiliki Oxfam, organisasi mitra, masyarakat dan pemerintah daerah.



## Menggugat Hak Politik Perempuan!

**PENULIS** Hesti Armiwulan dan Dian Noeswantari

Buku ini mengilustrasikan kenyataan-kenyataan hidup perempuan yang berada dalam kondisi memprihatinkan, dalam bentuk sebuah tanya jawab sederhana atas beragam topik dan realita hidup keseharian yang dibagi menjadi tiga bahasan besar: posisi, gerakan, dan partisipasi perempuan. Buku ini bisa menjadi bahan informasi untuk lebih bisa memahami hak-haknya, terlebih hak politiknya dan arti penting keterlibatan dan partisipasi secara politik.



## Jurnal Analisis Sosial: Pertanian Pangan; Mitos dan Realita Pertanian Padi di Indonesia

**PENERBIT** Akatiga

Pangan di Indonesia tidak terlepas dari komoditas beras. Beras merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi hampir sebagian besar rakyat Indonesia. Prioritas pangan menjadi salah satu utama setiap masa pemerintahan presiden. Respon terhadap pentingnya sektor pangan tersebut dilakukan Akatiga melalui penelitian kemandirian pangan sejak tahun 2013 dengan tujuan untuk mengeksplorasi masalah dan potensi pertanian padi skala kecil di Indonesia. Dalam jurnal ini, merangkum 5 tulisan peneliti Akatiga tentang pertanian pangan, Mitos dan Realita Pertanian Padi.